

**PELELANGAN IKAN RAJAWALI SEBAGAI SALAH SATU SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA
UJUNG PANDANG**



BOSOWA

Oleh :

ABDURRAHMAN

No. Stb / Nirm : 4586 010 520 / 87113 4034

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1992

PELELANGAN IKAN RAJAWALI SEBAGAI SALAH SATU SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA
HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PELELANGAN IKAN RAJAWALI SEBAGAI
SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA UJUNG-
PANDANG

NAMA MAHASISWA : ABDURRAHMAN

NO. STB/NIRM : 4586 010 520 / 87 113 4034


JURUSAN : STUDI PEMBANGUNAN

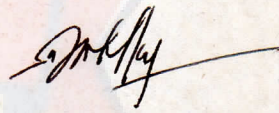
PROGRAM STUDI : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Drs. LP, TULUNG, MS)


(SUKMAWATI, SE)

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"

KETUA JURUSAN STUDI
PEMBANGUNAN



(PALIPADA PALISURI, SE)


(SUKMAWATI, SE)

HALAMAN PENERIMAAN



Pada Hari/ Tanggal :

Skripsi atas Nama : ABDURRAHMAN

Nomor Stambuk/ Nirm: 4586 010 520 / 87113 4034

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang, Untuk memenuhi salah satu Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan.

Pengawas Umum : PROF. Mr. DR. H. A. Zainal Abidin Farid (.....)

: DR. H. A. Karim Saleh (.....)

Ketua : Palipada Palisuri, SE (.....)

Sekretaris : Ramli Manrapi, SE (.....)

Penguji : DR. Abdul Rahman Panetto, MA (.....)

Drs. LP Tulung, MS (.....)

Drs. I Made Benyamin, Mec (.....)

Drs. H.F. Ruru (.....)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, ucapan rasa syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin, yang merupakan kata pengingat untuk mengerjakan sesuatu dalam hal penulisan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang.

Renungan yang dialami penulis silih berganti bagai siang dan malam yang menimbulkan derap dan langkah yang selama menuntut ilmu dengan bergelut buku selama 5 tahun tanpa resah dan gelisah demi ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu penulis berkata tentang perumpamaan yang kita dapat mengerti sebagaimana pepatah mengatakan "Tuntutlah Ilmu Selagipun Ke Negeri Cina", sehingga tak putus asah sekalipun maju pantang mundur sebelum berhasil.

Seiring dengan pengembangan pembangunan nasional yang mencakup semua sektor terus menerus dilancarkan demi tercapainya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga yang melatar belakangi inilah penulis terdorong untuk melakukan penelitian sampai sejauh mana kontribusi dari salah satu potensi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, yaitu pelelangan ikan terhadap pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah ini, dengan judul "Pelelangan Ikan Rajawali Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang".

Keadaan struktur ekonomi tersebut dirasa kurang mampu mencukupi kebutuhan penduduk dan angkatan kerjanya sehingga kesempatan angkatan kerja perlu diarahkan ke sektor non migas yang memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. Oleh karena itulah sehingga dengan ketekungan yang disertai dengan bantuan dari berbagai pihak maka dapat mengatasi hambatan tersebut.

Pada kesempatan ini rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Drs. LP Tulung, MS dan Ibu Sukmawati, SE yang telah bersedia menjadi konsultan dalam mengarahkan penulis sampai selesai penulisan skripsi ini, serta Dosen yang telah mendidik selama 5 tahun mengajar pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang dan Bapak Kepala UPTD Pelelangan Ikan Rajawali bersama stafnya.

Walaupun tulisan ini jauh dibawah bobot ilmiah, tetapi bagi penulis merupakan karya besar dan punya arti yang dapat penulis jadikan sebagai motivasi dalam hal ini menambah khasanah perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak pihak yang membantu memberikan masukan-masukan baik melalui proses diskusi maupun melalui konsultasi serta literatur yang menujukkan, amat sulit kiranya apabila penulis sebutkan satu persatu, oleh karena itu tak ada imbalan yang ganda kecuali do'anya kehadiran Allah Rabbul Alamin semoga kebijakan mendapat pahala.

Sebagai penutup penulis dengan lapang dada menunggu uluran tangan berupa saran-saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Menanti, adalah yang sudah dialami oleh penulis untuk memasukkan kritik dan saran-saran dari simpatisan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan.

Atas segalanya pada Allah SWT, semoga Doa menyertai-ku selalu, a a a m i n

Ujung Pandang, Januari 1992

Penulis,

(ABDURRAHMAN)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Hipotesis	7
BAB II. KERANGKA TEORITIS	8
2.1. Kebijakan Fiskal	8
2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	10
2.3. Pajak Dan Retribusi	17
2.4. Jenis-Jenis Retribusi	20
BAB III. METODOLOGI	25
3.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian ...	25
3.2. Jenis Dan Sumber Data	27

	3.3.	Metode Pengumpulan Data	27
	3.4.	Metode Analisis	27
	3.5.	Konsep Operasional	28
	3.6.	Tata Urut Bahasan	28
BAB	IV.	KEGIATAN TEMPAT PELELANGAN IKAN	30
	4.1.	Keadaan Tempat Pelelangan Ikan Rajawali	30
	4.2.	Fasilitas Pelelangan Ikan Rajawali	33
	4.3.	Perkembangan Kegiatan Di- TPI Rajawali	35
	4.4.	Perkembangan Penerimaan Penjual- an Ikan Di TPI Rajawali	37
BAB	V.	SUMBANGAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN RAJAWALI DAN PROYEKSI PERKEMBANGAN..	45
	5.1.	Sumbangan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Rajawali	45
	5.2.	Proyeksi Pengembangan Kegiat- an Di TPI Rajawali	50
BAB	VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	65
	6.1.	Kesimpulan	65
	6.2.	Saran-saran	67
		Daftar Kepustakaan	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Kotamadya Ujung Pandang Untuk Setiap Kecamatan Tahun 1990	26
2. Volume Penjualan Ikan Melalui TPI Rajawali Untuk Setiap Jenis Ikan Tahun 1986 - 1990	35
3. Perkembangan Hasil Penjualan Ikan Di TPI-Rajawali Untuk Setiap Jenis Ikan Tahun 1986-1990 ...	37
4. Harga Jual Rata-rata Ikan Laut Setiap Ton Di TPI Rajawali Dari Tahun 1986 - 1990	38
5. Harga Jual Rata-rata Ikan Tambak Setiap Ton Di TPI Rajawali Dari Tahun 1986 - 1990	39
6. Perkembangan Penerimaan Jumlah Retribusi TPI Rajawali Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Tahun 1986 - 1990	47
7. Perkembangan Penerimaan Jumlah Retribusi TPI Rajawali Terhadap Retribusi Keseluruhan Kotamadya Ujung Pandang	48
8. Perhitungan Proyeksi Volume Penjualan Ikan Di TPI Rajawali Dari Tahun 1991 - 1995	51
9. Hasil Proyeksi Volume Penjualan Ikan Di-TPI Rajawali Dari Tahun 1991 - 1995	54
10. Perhitungan Proyeksi Harga Ikan Setiap Ton Di TPI Rajawali Dari Tahun 1991 - 1995	57
11. Hasil Proyeksi Hasil Harga Penjualan Setiap Ton Ikan Di TPI Rajawali Dari Tahun 1991-1995	60
12. Proyeksi Nilai Penjualan Ikan Di TPI Rajawali Dari Tahun 1991 - 1995	61

13. Proyeksi Penerimaan Retribusi Di TPI-
Rajawali Dari Tahun 1991 - 1995



DAFTAR GRAFIK

Grafik

Halaman

1.	Perkembangan Volume Penjualan Ikan Per- Jenis Di TPI Rajawali Dari Tahun 1986 -1990	4
2.	Perkembangan Hasil Penjualan Ikan Per- Jenis Di TPI Rajawali Dari Tahun 1986 - 1990	4
3.	Perkembangan Volume Penjualan Ikan Di TPI Rajawali Dari Tahun 1986 - 1990	4
4.	Perkembangan Hasil Penjualan Ikan Di TPI Rajawali Dari Tahun 1986 - 1990	4
5.	Proyeksi Penjualan Ikan Di TPI Rajawali Dari Tahun 1991 - 1995	5
6.	Proyeksi Nilai Penjualan Ikan Di TPI Rajawali Dari Tahun 1991 - 1995 $\frac{1}{2}$	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan
Rajawali Kotamadya Ujung Pandang 3



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : PETA KOTAMADYA UJUNG PANDANG



BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang mana mencakup semua sektor terus menerus digalakkan demi tercapainya tujuan yaitu menciptakan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan di Indonesia yang oleh pemerintah direncanakan atau dicanangkan melalui setiap PELITA, suatu tahapan yang siap menuju tinggal landas kearah cita-cita bangsa Indonesia.

Sudah barang tentu dalam pelaksanaan pembangunan tersebut pemerintah harus didukung oleh faktor sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran terlaksananya pembangunan tersebut. Pemerintah dengan segala upaya yang dilakukan untuk mengarahkan seluruh daya dan dana untuk mensukseskannya pembangunan itu.

Sumber terbesar bagi pembiayaan pembangunan diperoleh dari pendapatan minyak dan gas bumi yang oleh pemerintah disadari bahwa dengan ketergantungan negara pada pendapatan dari minyak dan gas bumi tersebut harus dikurangi oleh sebab dengan situasi pasaran minyak yang tidak menentu di luar negeri sehingga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dalam negeri dan serta mengganggu pembangunan yang sedang giatnya dibangun, pada akhirnya mempunyai dampak negatif pada

pencapaian cita-cita bangsa Indonesia.

Untuk itu pendapatan negara dari non migas harus terus digali, antara lain dengan menggalakkan esport barang-barang non migas ke luar negeri yang mana dapat menghasilkan devisa bagi negara, juga dengan ditingkatkannya usaha-usaha lainnya untuk mempertinggi pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Di Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan membedakan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Hal ini berlaku di daerah otonom, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II, diharapkan pendapatan asli daerahnya itu dapat menutupi kebutuhan rutin, lebih baik lagi kalau dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

Dalam penjelasan penghasilan pemerintah, maka ruang lingkup pembahasan didalam suatu negara. Pemerintah Indonesia memakai sistem otoritasi yang seluas-luasnya dalam keuangan daerah. Kini pemerintah daerah memegang peranan penting karena otoritasi yang digunakan untuk pembangunan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sumber-sumber pembiayaan daerah adalah merupakan suatu masalah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Diantara yang termasuk pendapatan daerah adalah :

1. Pajak rumah tangga
2. Pajak kendaraan bermotor
3. Bea balik nama tanah

Secara ringkas, sumber-sumber penerimaan pemerintah

daerah antara lain adalah :

1. Pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat yaitu :
 - Pajak negara
 - Bea dan cukai
 - Ganjaran subsidi dan sumbangan negara
2. Pendapatan yang berasal dari daerah sendiri (PAD) yaitu :
 - Pajak daerah
 - Retribusi daerah dan pendapatan jawatan daerah
 - Perusahaan daerah
 - Iuran pembangunan daerah
 - Sumbangan-sumbangan wajib
 - Pendapatan lain-lain

Dengan demikian, maka pemerintah daerah mempunyai suatu sumber pendapatan yang merupakan pendapatan aslinya yang hasil pengelolaan sendiri yang diterima sebagai wewenang dari pemerintah pusat. Dalam kenyataan, sebagian besar pendapatan asli daerah tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya saja, apalagi biaya pembangunan di daerahnya besarnya pendapatan asli daerah apabila dibandingkan dengan kebutuhan belanja rutin bervariasi antara 10 sampai 80 persen. Karena pendapatan asli daerah pada umumnya tidak cukup untuk pembiayaan rutin maka terpaksa pula dibiayai dengan pendapatan non asli daerah atau subsidi pemerintah pusat.

Memang yang ideal adalah pemerintah daerah mempunyai

pendapatan asli yang lebih besar dari pendapatan non asli daerah, sehingga tidak terlalu tergantung dari pemerintah pusat tetapi sebagai bagian negara kesatuan memang tidak baik apabila seluruh pendapatan daerah itu sendiri dari pendapatan asli saja. Meskipun persentasenya kecil, namun jangan melepas diri dari pemerintah pusat termasuk dalam bidang keuangan.

Karena kenyataannya sebagian besar daerah tingkat II di Indonesia itu pendapatan asli lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan non aslinya, maka mengurangi kemandirian dalam bidang keuangan daerah, padahal untuk daerah otonom, kemandirian urusan rumah tangga sendiri mutlak perlu sehingga untuk mengatasi kekurang mandirian tersebut, hemdaknya dipikirkan agar pemerintah atasan mengurangi campur tangannya melalui subsidi yang telah diberikan atas daerah.

Pada tahap selanjutnya, perlu diteliti pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sebenarnya memang sangat diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan daerahnya, karena banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan pendapatan asli daerah maka itu berarti semakin tinggi pula kualitas otonominya. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat terus sehingga dapat diandalkan nantinya untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Pemerintah Tingkat II Ujung Pandang misalnya, punya beberapa potensi yang dimiliki untuk pembiayaan pembangunan

daerah ini, salah satu dari sekian banyaknya sumber-sumber pendapatan asli daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, yaitu Pelelangan Ikan Rajawali yang mana perkembangan dari pelelangan tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan.

Dalam peningkatannya itu pada tahun 1986 mampu memasukkan pendapatan asli daerah melalui retribusi yang dipungut di pelelangan ikan ini yaitu sebesar Rp 49.778.476,- dan pada tahun berikutnya pada tahun 1987, mampu menyumbangkan sebanyak Rp 74.519.198,- atau meningkat sebesar 1,49%, dari tahun 1988 mampu memasukkan sebesar Rp 102.339.069,- atau meningkat sebesar 1,37%, dan pada tahun 1989, meningkat sebanyak 1,02% atau sebesar Rp 104.496.483,- dan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1990 mampu memasukkan sebanyak 1,21% melihat perkembangan dari pelelangan ini terhadap pendapatan asli daerah yang disumbangkan kepada pemerintah Kotamadya Ujung Pandang maka penulis bermaksud untuk menjadikan sebagai tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu sejauh mana kontribusi dan sumbangannya terhadap pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan di daerah ini, penulis angkat dengan judul "Pelelangan Ikan Rajawali Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang".

1.2. Perumusan Masalah

Merupakan masalah pokok dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

- Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan guna meningkatkan kegiatan dari Pelelangan Ikan Rajawali di Ujung Pandang sehingga nantinya mampu memperoleh pendapatan sebesar-besarnya, yang selanjutnya meningkatkan pula salah satu sumber pendapatan daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang untuk membiayai pembangunan di daerah ini, untuk tahun-tahun mendatang.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk melihat sampai berapa banyak sumbangan pendapatan yang diberikan oleh Pelelangan Ikan Rajawali di Ujung Pandang dalam kaitannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang sampai tahun 1990.

1.3.2. Untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan Pelelangan Ikan Rajawali di Ujung Pandang tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini, yakni dari tahun 1986 - 1990.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan atau keterangan bagi pengambilan kebijaksanaan pemerintah untuk menambah sumber pendapatan asli daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.

1.4.2. Disamping itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan studi perbandingan bagi penelitian lain yang ada

kaitannya dengan penulisan ini.

1.4.3. Penulisan ini penting artinya bagi penulis untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi di Universitas "45" Ujung Pandang.

1.5. Hipotesis

Adapun hipotesis yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Diduga bahwa kegiatan Pelelangan Ikan Rajawali di Ujung Pandang ini dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena sarana penangkapan yang digunakan oleh para nelayan semakin lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana masih menggunakan alat yang tradisional.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1. Kebijakanaksanaan Fiskal

Kebijakanaksanaan fiskal meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mendorong dalam menciptakan stabilitas ekonomi atau pendorong aktivitas ekonomi suatu negara. Kebijakanaksanaan fiskal merupakan bahagian dari keuangan negara.

Pengertian kebijakanaksanaan fiskal dan keuangan negara sampai saat ini belum ditemukan suatu batasan pemisah yang jelas antara keduanya, seperti dikemukakan oleh Willem H. Makaliwe, "Sekitar Hubungan Kebijakanaksanaan Fiskal Dan Kesempatan Kerja" (1983. Hal. 67), sebagai berikut :

"Semenjak tahun 1930 sesungguhnya digunakan dua istilah yaitu "Public Finance" (keuangan negara) disamping "Fiscal Policy" (kebijaksanaan fiskal) sesuai dengan ajaran Keynes. Namun karena istilah ini belum dapat ditarik garis pemisah yang jelas, antara keduanya maka dalam tahun 1973, Rocmat Soemitro yang dikutip oleh Willem H. Makaliwe masih memperingatkan bahwa belum dapat ditarik garis pemisah yang jelas antara kebijakanaksanaan fiskal disatu pihak dan keuangan negara (dimasa lampau kedua sinonim), sesuai kebijakanaksanaan pemerintah dilain pihak, sesuai dengan penggolongan Burhead".

Dengan demikian antara pengertian kebijakanaksanaan fiskal dan keuangan negara merupakan dua pengistilahan yang sukar dipisahkan, oleh karena keduanya membicarakan masalah kebijakanaksanaan pemerintah dalam mempertinggi aktivitas ekonomi suatu negara.

Sasaran kebijaksanaan fiskal adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diiringi dengan kestabilan ekonomi itu sendiri, pertumbuhan ekonomi tanpa disertai kestabilan ekonomi itu sendiri tidak diinginkan dalam kebijaksanaan fiskal.

Jadi kebijaksanaan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan melalui mekanisme pasar yang ada, namun demikian tidaklah berarti bahwa pemerintah berusaha menggantikan mekanisme pemecahan melalui pasar tersebut. Kebijakan fiskal merupakan suatu alternatif kebijaksanaan secara menyeluruh yang demikian tersebut kadang-kadang menganggap perlu bagi pemerintah untuk memiliki industri dan dalam bidang perbankan juga tidak ketinggalan untuk mempercepat pembangunan dalam hal penerimaan pajak, dan sistemnya mudah dipahami oleh masyarakat sekaligus wajib pajak dapat menghitung pajaknya sendiri.

Namun perlu diketahui bahwa dalam merumuskan kebijaksanaan dapat mempertinggi tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan, maka sedapat mungkin kebijaksanaan itu harus pula menjaga agar usaha untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan pemerintah dari sektor pajak dan tidak akan menimbulkan akibat buruk terhadap semangat untuk menabung dalam mengadakan investasi nantinya.

Didalam kebijaksanaan fiskal, terdapat tiga unsur pokok menurut Burkhead yang dikutip oleh Willem H. Makaliwe

(1983, Hal. 3), ketiga unsur pokok tersebut dalam kebijaksanaan fiskal tersebut adalah sebagai berikut :

- "1. Pajak-pajak
2. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah
3. Tatalaksana hutang (guna mengatasi inflasi)".

Peraturan-peraturan perpajakan yang diatur oleh pemerintah disamping dapat merupakan suatu pendapatan negara secara langsung, juga secara tidak langsung dapat mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya misalnya penurunan pajak ekspor dampak lainnya ialah selain menghasilkan devisa bagi negara , juga dapat men ciptakan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja.

2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang "Pokok-pokok pemerintahan di daerah" disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah adalah :

- a. Pendapatan asli daerah sendiri, yang meliputi :
 - Hasil pajak daerah
 - Hasil retribusi daerah
 - Hasil perusahaan daerah
 - lain-lain hasil usaha daerah
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah (pusat), yang terdiri :
 - Sumbangan dari pemerintah
 - Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

c. Lain-lain pendapatan yang syah

Pasal selanjutnya yaitu untuk kelengkapan bagi seluruh keuangan daerah dicantumkan dalam pasal 56 sampai pasal 61 secara garis besarnya disebutkan bahwa dengan undang-undang yang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah. Didalam pasal ini juga disebutkan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang diatur dengan undang-undang dan juga peraturan daerah yang menetapkan pemungutan pajak dan retribusi.

Dalam menyusun anggaran keuangan daerah, sepanjang mengenai pendapatan daerah, harus diperhatikan pula peraturan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan, yaitu keuangan negara dan daerah yang berlaku :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1965, tentang perimbangan keuangan antara negara dan daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957, tentang pemberian atau penyerahan pajak negara kepada daerah
- c. Peraturan Pemerintah tentang penetapan persentase dari beberapa penerimaan untuk daerah, yang tiap tahunnya dikeluarkan oleh pemerintah.

Sampai saat ini yang merupakan sumber pendapatan asli bagi daerah adalah apa yang tercantum dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1986 tentang pengumpulan dana mengenai sumber-sumber penghasilan daerah otonom yang terdiri dari :

- A. Pajak daerah
1. Pajak atas pertunjukkan dan keramaian umum
 2. Pajak atas reklame sepanjang tidak memuat dalam majalah
 3. Pajak atas izin penjualan atau pembikinan petasan
 4. Pajak atas izin penjualan minuman yang mengandung alkohol
 5. Pajak atas kendaraan tidak bermotor
 6. Pajak atas izin mengadakan penjudian
 7. Pajak atas tanda kemewahan mengenai luas dan perhiasan
 8. Pajak atas berdiam disuatu tempat atau daerah lebih dari 120 hari dalam satu tahun pajak, kecuali untuk perawat di dalam rumah lengkap dengan perabotnya untuk diri sendiri dan keluarganya, semuanya tanpa bertinggal tetap di daerah itu dengan ketentuan bahwa mereka berdiam di luar daerah itu dengan ketentuan bahwa mereka menjalankan tugas yang dierikan oleh negara atau daerah tidak boleh dikenakan pajak.
 9. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan dengan jalanan umum di daerah itu atau letak dan juga atas milik berupa tanah, yang kosong yang berbatasan atau merupakan jalan keluar pada jalan tersebut pajak ini dapat dipungut atas dasar sumbangan yang layak untuk pembiayaan penerangan, serta pembuangan air dan kotorannya.
 10. Pajak atas milik berupa bangunan serta keturunannya dan

tanah kosong yang terletak dalam bagian daerah tertentu dari daerah, pajak dipungut tiap-tiap tahun untuk selama 30 tahun atas dasar sumbangan yang layak guna membiayai pekerjaan yang diselenggarakan atau dengan bantuan daerah itu yang menguntungkan milik-milik tersebut.

11. Pajak sekolah yang semata-mata dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah sekolah untuk pelajaran umum dan pembelian perlengkapan pertama.
12. Pajak penerangan jalan
13. Pajak pemberian air minum
14. Pajak pendaftaran perusahaan
15. Pajak rumah penginapan
16. Pajak atas mempunyai barang-barang mewah dan bangunan yang menjulang tinggi dipinggir jalan, serta bangunan yang dikuasai oleh daerah
17. Pajak perusahaan
18. Pajak kendaraan diatas air
19. Pajak pelabuhan perahu
20. Pajak pengangkutan garam keluar daerah
21. Pajak asuransi
22. Pajak pengambilan saran burung
23. Pajak pengambilan rumput laut
24. Pajak pengambilan telur penyu
25. Pajak rumah-rumah asap

26. Pajak rumah-rumah tembakau

27. Pajak pelelangan ikan

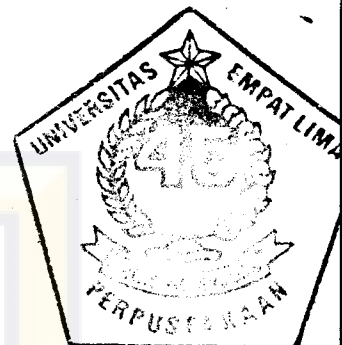
B. Pajak pusat yang diserahkan kepada daerah tingkat II yang terdiri dari :

- Pajak radio
- Pajak jalan
- Pajak kopra
- Pajak televisi
- Pajak pembangunan
- Pajak rumah tangga
- Pajak bangsa asing
- Pajak potong hewan

C. Retribusi yang meliputi :

- Uang leges
- Bea pangkalan
- Bea penambangan
- Bea pemeriksaan atau pembantaian
- Uang sewah tanah atau bangunan
- Uang sempadan atau izin bangunan
- Uang bea penguburan
- Retribusi pengerukan kakus
- Retribusi pemberian izin perusahaan industri kecil
- Uang pengujian kendaraan bermotor
- Bea jalan atau jembatan
- Retribusi pelelangan ikan

- Retrebusi jembatan timbang
- Retribusi station bis, taksi dan sebagainya
- Retribusi tempat rekreasi
- Retribusi pasar
- Retrebusi reklame
- Retrebusi pasanggrahan
- Retribusi pemeriksaan susu
- Dan sebagainya.



Selain apa yang terperinci yang telah ditetapkan oleh instansi-istansi atau Intruksi Menteri Dalam Negari tersebut diatas, masih ada lagi pendapatan asli daerah yakni, perusahaan daerah, dinas-dinas daerah dan lain-lain pendapatan yang syah.

D. Perusahaan daerah

Pemerintah daerah juga diberi hak untuk perusahaan sendiri, yang merupakan perusahaan daerah. Prinsip pengelolaan haruslah berdasarkan ekonomi perusahaan dengan demikian harus mencari untung. Sebagian (tertentu) dari keuntungan wajib disetor kekas daerah, perusahaan daerah dapat beroperasi dibidang kontruksi, tranportasi, pembuatan barang dan lainnya, yang berada pada daerah tersebut.

E. Dinas-dinas daerah

Selain perusahaan daerah, maka pemerintah daerah dilengkapi dengan beberapa macam dinas daerah. Dinas-dinas daerah ini ada beberapa yang menghasilkan uang bagi daerah

misalnya : Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan, Pertanian dan Dinas Peternakan serta Dinas Perikanan dan lainnya.

F. Lain-lain pendapatan daerah

Sumber-sumber dari dalam daerah merupakan sumber dari pendapatan suatu daerah diperoleh dari : Penerimaan daerah dari penjualan barang-barang milik daerah, penerimaan dari jasa giro dan bank, penerimaan dari kartu tanda penduduk, dan lain-lain yang belum disebut diatas yang dikategorikan dalam aturan-aturan terdahulu lainnya.

Sumber pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah sebagai atasan dari daerah tingkat II, dapat berupa antara lain ialah :

1. Subsidi dari pemerintah pusat
2. Subsidi dari pemerintah daerah tingkat I
3. Bantuan Inpres
4. Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat II kepada pihak lain
5. Dan lain-lain sumber diluar pendapatan asli daerah.

Sumber-sumber keuangan yang diluar pendapatan asli daerah, dapat juga dinamakan sumber pendapatan non asli. Sifat sumbangan terhadap daerah tingkat II yang bersumber dari atasan adalah lebih terikat dalam pelaksanaannya. Jadi apabila pemerintah pusat maupun daerah tingkat I memberikannya sumbangan baik berupa subsidi maupun Inpres dan sumbangan lainnya, maka umumnya diikuti oleh persyaratan tertentu.

Dalam penggunaannya serta tujuan penggunaan yang ditentukan teknis pelaksanaannya dan jangka waktu penyelesaiannya, tugas maka muncullah contoh-contoh yang hanya boleh untuk sarana dan prasarana dari fisik saja, maupun faktor lainnya.

Ini berarti tidak jelek kalau dilihat dari lingkungan luas atau lingkungan nasional. Tetapi jika dilihat dari kacamata daerah tingkat II yang bersangkutan akan mengurangi kemandirian daerah tersebut dalam menggunakan dana yang disediakan, padahal daerah otonom adalah daerah yang berwenang mengelola urusan rumah tangganya sendiri.

2.3. Pajak Dan Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957, yang dimaksud dengan pajak daerah ialah :

"Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan-peraturan pajak-pajak ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik".

Dengan demikian segala macam pungutan yang syah serta yang ditetapkan menurut peraturan-peraturan atau ketetapan daerah yang bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai pajak-pajak daerah namun demikian tidak semua pungutan tersebut dapat dikategorikan sebagai pajak daerah, seperti dikemukakan oleh C. Goedhart, "Garis-Garis Ilmu Keuangan Negara". (1973, Hal. 92), sebagai berikut :

1. Pajak
2. Retribusi
3. Sumbangan
4. Denda
5. Premi untuk asuransi sosial".

Hal ini berarti bahwa semua pungutan tersebut dapat dikategorikan pajak, meskipun yang diberikan oleh negara itu sendiri merupakan salah satu jenis pungutan.

Berbeda dengan pajak, retribusi mempunyai hubungan langsung dengan kontra prestasi yang diberikan oleh negara guna pembayaran tersebut memang secara khusus dimaksudkan untuk mendapatkan suatu prestasi dari negara (pemerintah), yang dapat dinikmati secara perseorangan, misalnya pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), pembayaran rekening listrik dan air minum, telepon atau telegram, pembayaran penggunaan lokasi pasar, terminal dan lain-lain.

Untuk memperoleh pengertian yang jelas tentang retribusi dan kaitannya dengan pokok pembahasan ini, maka penulis mengutipkan beberapa pendapat tentang retribusi tersebut.

Retribusi berasal dari kata "Re" yang mana berarti kembali dan "Tribusio" yang berarti penghargaan. Kata ini berasal dari kata latin yang jika diartikan dapat berarti "Mengembalikan Penghargaan", dapat juga dikatakan "Membayar Imbalan",

Hal ini berarti retribusi itu terjadi karena untuk membayar imbalan jasa yang telah diperoleh, hal ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh pakar hukum Rochmat Soemitro, "Dasar-Dasar Hukum Pendapatan", (1977, Hal. 77), sebagai berikut :

"Retribusi ialah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan mereka yang menggunakan jasa negara".

Seperti juga dikemukakan oleh R. Soedargo (1964, Hal. 62), sebagai berikut :

"Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa-jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan".

Sedangkan pengertian yang diberikan atau dikemukakan oleh C. Goedhart, (Hal. 90-91), yang diterjemahkan oleh Ratmoko sebagai berikut :

"Retribusi ialah penerimaan yang diperoleh pengusaha publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan berhubung dengan prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum secara khusus dilaksanakan sendiri oleh pengusaha publik".

Dan pengertian yang senada dengan diatas yang dikemukakan oleh B. Usman dan K. Subroto, "Pajak-Pajak Indonesia, (1980, Hal. 16), sebagai berikut :

"Retribusi yaitu pengertian yang dilakukan oleh suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung kepada pembayar".

Dari beberapa kutipan diatas maka pengertian retribusi di sini ditandai dengan adanya prestasi pengusaha itu disuatu pihak atau prestasi perseorangan swasta yang mana berhubungan dengan kepentingan umum, jadi merupakan tukar-menukar prestasi, karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan usahanya itu.

Jadi dapat dikatakan retribusi adalah pungutan suatu

prestasi (balas jasa), atau pengambilan jasa yang langsung dari pihak lain, atau pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas tentang pajak dan retribusi, maka dapatlah dipahami dengan mudah bahwa perbedaan pokok antara pajak dan retribusi terletak pada sifatnya dan kontra prestasinya yang diberikan oleh negara. Padahal retribusi terdapat suatu prestasi yang langsung dapat dinikmati atau dapat dimanfaatkan oleh pembayar retribusi.

2.4. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Terdapat beberapa macam retribusi yang sering dipungut seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 sebagai berikut :

a. Uang leges

Yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dengan melalui penjualan atau mengeluarkan leges yakni semacam materai yang harus digunakan untuk kepentingan tertentu misalnya untuk surat keterangan penduduk sementara dan surat pengantar untuk penelitian yang ditujukan kepada instansi tersebut.

b. Bea Jalan Atau Jembatan

Yaitu pungutan pemerintah daerah kepada kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan dan jembatan yang telah ditetapkan seperti jalan tool, jembatan dan sebagainya.

c. Bea Penambangan

Yaitu bea yang dikenakan pengusaha yang bergerak pada

bidang pertambangan dimana lokasi tambang tersebut, terdapat dalam wilayah daerah yang memungut bea tambang.

d. Bea Pemeriksaan atau Pembantaian

Yaitu bea yang dipungut atas hewan yang akan dipotong yang terdiri atas bea pemeriksaan apakah hewan itu layak dipotong atau dikonsumsi, bea potong sendiri yang dikenakan terhadap pemeriksaan pembantaian itu tergantung dari jenis hewan yang akan dipotong tersebut.

e. Uang Sewa Tanah atau Bangunan

Yaitu sewa yang dipungut atas pemanfaatan tanah itu dan bangunan yang sifatnya milik pemerintah daerah.

f. Uang Bea Penguburan

Yaitu bea yang dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan tanah untuk penguburan dalam wilayah yang bersangkutan.

g. Uang Sempadan atau Izin Bangunan

Yaitu bea yang dikenakan terhadap orang yang akan mendirikan suatu bangunan atau untuk memperoleh surat izin dimana dalam mendirikan sebuah gedung atas bea ini tergantung dari kondisi atau luas bangunan yang akan dibangunnya.

h. Uang Bea Atas Pemakaian Tanah

Yaitu bea yang dibebankan terhadap pemanfaatan tanah tertentu yang berada dalam lokasi daerah yang bersangkutan.

i. Retribusi Pengerukan Kakus atau WC

Yaitu bea yang dikenakan atas pelaksanaan pengerukan kakus dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan

Daerah yang bersangkutan.

j. Retribusi Pelelangan Ikan

Yaitu retribusi yang dipungut terhadap nelayan atau penjual ikan yang menggunakan fasilitas pelelangan ikan yang dimiliki daerah tertentu guna memasarkan hasil tangkapannya maupun hasil tambak petani. Besarnya bea itu ditentukan oleh besar kecilnya volume penjualan ikan yang dilakukan.

k. Retribusi Balai Pengobatan

Yaitu retribusi yang dipungut atas pemberian izin untuk mendirikan usaha dibidang pengobatan yang terdapat di dalam wilayah daerah tersebut.

l. Retribusi Pemberian Izin Perusahaan Industri Kecil

Yaitu retribusi yang dipungut atas perusahaan atas pemberian izin untuk pendirian usaha dibidang industri.

m. Retribusi Jembatan Timbang

Yaitu retribusi yang dikenakan kepada kendaraan atau mobil angkutan yang memanfaatkan jembatan timbang guna menimbang berat barangangkutannya apakah sesuai peraturan.

n. Retribusi Station Bis, Taxi dan sebagainya

Yaitu retribusi yang dikenakan kepada kendaraan atau mobil angkutan umum yang menggunakan fasilitas terminal itu guna memperoleh muatan.

o. Retribusi Tempat Rekreasi

Yaitu retribusi yang dikenakan terhadap orang-orang

yang berkunjung ketempat-tempat rekreasi yang berada dalam wilayah daerah yang mempunyai tempat-tempat rekreasi.

p. Retribusi Pasanggrahan

Retribusi yang dipungut terhadap orang-orang yang memanfaatkan jasa pasanggrahan sebagai tempat penginapan yang terdapat disuatu tempat tertentu.

q. Retribusi Pasar

Yaitu retribusi yang dipungut dari pedagang-pedagang yang memanfaatkan suatu pasar yang terdapat dalam wilayah tersebut guna memasarkan barang-barang dagangannya.

r. Retribusi Reklame

Yaitu retribusi yang dipungut ini dari perusahaan yang memasang reklame-reklame ditempat atau dipinggir jalan yang terdapat dalam daerah tertentu.

s. Retribusi Atas Pengeluaran Hasil Pertanian, Hutan serta Hasil Laut

Yaitu retribusi yang dipungut dari pengusaha-pengusaha yang mengeluarkan hasil-hasil pertanian, hutan dan laut dari suatu daerah ke daerah lain, besarnya bea ini ditentukan pada jenis komoditi yang akan dikeluarkan tersebut, dimana tarifnya ditentukan dalam peraturan-peraturan daerah yang bersangkutan.

t. Retribusi Pemeriksaan Susu

Yaitu retribusi yang dipungut terhadap perusahaan susu seperti sapi, domba, kambing dan lainnya yang mana diperiksa untuk menentukan apakah susu itu pantas dipasarkan.

Dengan demikian kita ketahui bahwa banyaknya jenis-jenis retribusi yang dipungut dalam suatu daerah tertentu akan ditentukan oleh kondisi atau keadaan daerah tersebut dengan demikian jenis retribusi yang merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah, disesuaikan dengan kondisi daerah yang tertentu.



BAB III
M E T O D O L O G I



3.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kotamadya Ujung Pandang yang merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 175,77 Km² yang terbagi atas 11 Kecamatan 62 Kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 1990 adalah sekitar 847.773 jiwa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Mariso, terbagi atas enam Kelurahan
2. Kecamatan Mamajang, terbagi atas lima Kelurahan.
3. Kecamatan Bontoala, terbagi atas tujuh Kelurahan.
4. Kecamatan Makassar, terbagi atas lima Kelurahan.
5. Kecamatan Biringkanaya, terbagi lima Kelurahan.
6. Kecamatan Panakkukang, terbagi atas lima Kelurahan.
7. Kecamatan Tamalate, terbagi atas lima Kelurahan.
8. Kecamatan Tallo, terbagi atas tujuh Kelurahan.
9. Kecamatan Ujung Pandang, terbagi atas lima Kelurahan.
10. Kecamatan Ujung Tanah, terbagi atas delapan Kelurahan.
11. Kecamatan Wajo, terbagi atas empat Kelurahan.

Kotamadya Ujung Pandang dalam batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat, berbatasan dengan Selat Makassar.
Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Maros.

Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Pangkep.

Kemudian lokasi daerah penelitian untuk pengambilan data tepatnya pada Kecamatan Mariso, karena sangat strategis letaknya untuk kantor TPI Rajawali, sebab mudah menghubungkan transportasi pasar-pasar yang ada di Kotamadya Ujung Pandang untuk penjualan ikan.

Dalam tahun 1990 jumlah penduduk wilayah Kotamadya Ujung Pandang yang terdiri 11 Kecamatan dengan jumlah penduduk setiap Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kotamadya Ujung Pandang Untuk Setiap Kecamatan Tahun 1990.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Mariso	55.584
2.	Mamajang	67.584
3.	Bontoala	64.575
4.	Makassar	93.542
5.	Biringkanaya	51.034
6.	Panakkukang	119.478
7.	Tamalate	170.480
8.	Tallo	99.600
9.	Ujung Pandang	37.656
10.	Ujung Tanah	45.018
11.	Wajo	42.817
Jumlah		847.773

Sumber Data : Kantor Statistik Kotamadya Ujung Pandang.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Data Primer, adalah data yang langsung diperoleh dari responden dengan melakukan interviuw untuk memperoleh gambaran konkrit tentang keberadaan mereka.

Data Skunder, adalah data yang diperoleh dari instansi-istansi yang erat hubungannya dengan penelitian ini sebagai berikut :

- Kantor TPI Rajawali
- Kantor Statistik Kotamadya Ujung Pandang
- Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang

3.3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai bahan penulisan karya tulis ini maka diadakan penelitian dengan pengumpulan data sebagai berikut :

3.3.1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data melalui literatur yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti untuk bahan penulisan.

3.3.2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti, guna memperoleh data secara langsung.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk membuktikan tingkatan perkembangan kegiatan pelelangan ikan dalam beberapa tahun ini yakni dari tahun 1986 - 1990, maka penulis

menggunakan analisis komparatif.

Sedangkan untuk melakukan proyeksi terhadap kegiatan TPI Rajawali pada priode mendatang, dengan perbandingan data tahunan yang diperoleh dari tahun 1986 - 1990, digunakan rumus analisa sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

dimana :

Y = Jumlah volume penjualan ikan

X = Priode

a = Konstante

b = Koefisien regresi

3.5. Konsep Operasional

Dalam konsep operasional ini penulis mendefinisikan semua istilah-istilah yang digunakan dari metode analisa sebagai berikut :

a b = Koefisien yang menunjukkan besar kecilnya pengaruh Y terhadap X

Y = Jumlah volume penjualan ikan, yaitu menggambarkan banyaknya ikan terjual dalam 1 (satu) priode.

X = Priode tertentu

3.6. Tata Urut Bahasan

Agar penulisan ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah dan mudah dimengerti, maka pembahasan disusun secara sistimatik sebagai berikut :

- BAB I. Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang perumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta hipotesis.
- BAB II. Berisi kerangka teoritis, yang membahas istilah yang berkaitan dengan pendapatan daerah, meliputi kebijakan fiskal, sumber-sumber pendapatan daerah, pengertian restribusi dan jenis-jenis restribusi.
- BAB III. Membahas metodologi penelitian, gambaran umum daerah penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis, serta konsep operasional.
- BAB IV. Merupakan bab yang membahas tentang kegiatan tempat pelelangan ikan (TPI) Rajawali di kota madya Ujung Pandang.
- BAB V. Membahas tentang sumbangan restribusi tempat pelelangan ikan Rajawali dan proyeksi pengembangannya.
- BAB VI. Berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

KEGIATAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

RAJAWALI DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

4.1. Keadaan Tempat Pelelangan Ikan Rajawali

Pelelangan ikan "Rajawali" merupakan salah satu dari 3 (tiga) buah tempat pelelangan ikan yang terdapat dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang, tempat pelelangan ikan ini mulai beroperasi sejak tahun 1970, dengan melayani nelayan yang berasal dari dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang sendiri, maupun nelayan yang berasal dari luar daerah, misalnya dari Kabupaten Maros, Pangkep, Takalar dan Bantaeng. Hasil mana meliputi hasil laut, dan hasil tambak.

Tempat pelelangan ikan Rajawali merupakan salah satu Sub. Unit dari pelelangan ikan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, sebagai aparat operasional pelaksana tugas terdepan dalam melakukan pemungutan retribusi pelelangan ikan, TPI Rajawali memiliki suatu struktur organisasi tersendiri dengan aparat pelaksana terdiri dari :

a. Kepala Sub. Unit Pelelangan Ikan Rajawali

Kepala Sub. Unit ini bertugas untuk menkoordinir pelaksanaan tugas dari pelaksana yang ada dalam lingkungan TPI Rajawali dan bertanggungjawab atas kelancaran seluruh pekerjaan dalam rangka pemungutan retribusi yang bersumber dari penjualan ikan ditempat pelelangan ikan tersebut.

Kepala Sub. Unit ini membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Pengembangan dan Pengawasan dan Bagian Tata Usaha serta Bagian Penagihan.

b. Bagian Pengembangan dan Pengawasan

Bagian ini bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang meliputi usaha-usaha dalam rangka pengembangan kegiatan pelelangan ikan serta melakukan pengawasan terhadap kelancaran tugas-tugas yang dilakukan oleh seluruh aparat di pelelangan ikan ini. Bagian ini bertanggungjawab kepada Kepala Sub. Unit atas kelancaran tugas dan kegiatan pengembangan dan pengawasan yang dibebankan kepadanya.

c. Bagian Tata Usaha

Bagian ini bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang kesekretariatan atau meliputi kegiatan administratif dalam lingkungan TPI Rajawali tersebut dan bertanggungjawab atas kelancaran tugas-tugas administratif tersebut kepada Kepala Sub. Unit, termasuk didalamnya kegiatan pencatatan-pencatatan pendapatan retribusi yang diperoleh.

d. Bagian Penagihan Retribusi

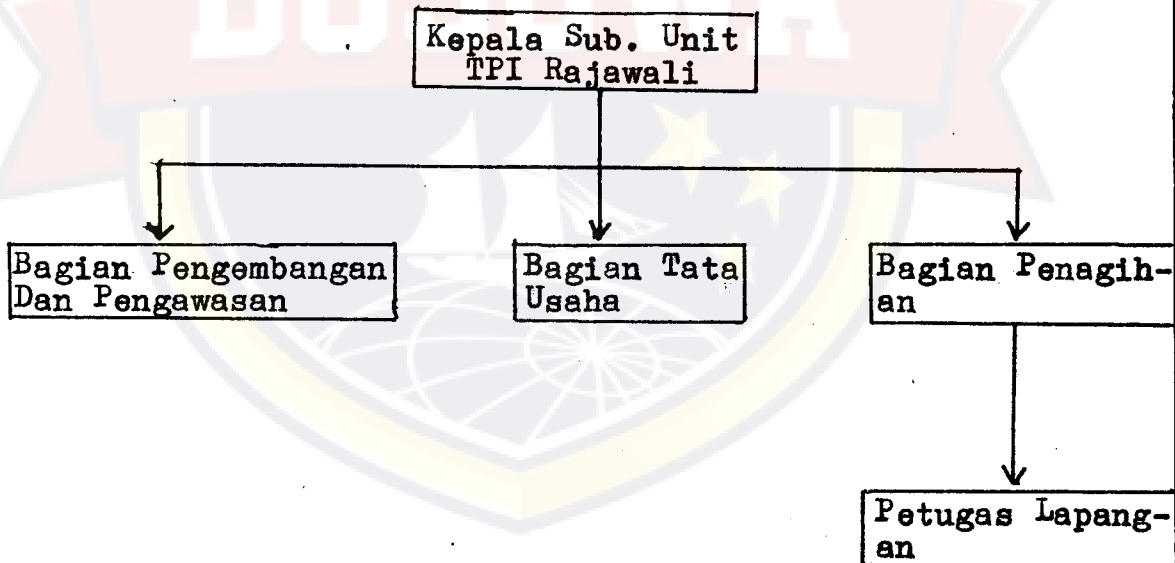
Bagian ini bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas penagihan retribusi terhadap nelayan-nelayan yang memanfaatkan TPI Rajawali ini sebagai tempat menjual hasil tambak maupun hasil tangkapan hasil laut. Kelancaran tugas-tugas penagihan retribusi ini merupakan tanggungjawab bagian ini dan setiap saat dilaporkan kepada Kepala Sub. Unit untuk menjami

kelancaran tugas-tugas dilapangan, bagian penagihan memanfaatkan petugas lapangan sebanyak 20 orang, petugas inilah yang sebara langsung melakukan pemungutan retribusi dari para nelayan.

Dengan perangkat ini organisasi yang dimiliki tersebut maka TPI Rajawali dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankannya, sebagai sumber pendapatan asli daerah Kotamadya Ujung Pandang.

Gambaran tentang sturktur organisasi TPI Rajawali dapat dilihat pada gambar skema berikut ini :

Gambar 1 : Struktur Organisasi Tempat Pelelengan Ikan Rajawali Kotamadya Ujung Pandang



Sumber : Kantor TPI Rajawali
Kotamadya Ujung Pandang

4.2. Fasilitas Pelelangan Ikan Rajawali

Untuk menjamin kelancaran tugas-tugas dan pengawasan terhadap nelayan yang akan menjual hasil tangkapannya melalui tempat pelelangan ikan ini, maka TPI Rajawali menyediakan fasilitas sebagai semua sarana penunjang guna kelancaran kegiatan pelelangan. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh TPI Rajawali adalah anatar lain sebagai berikut :

a. Dermaga

Dermaga ini merupakan sarana yang cukup penting artinya dimana pelelangan yang digunakan oleh nelayan dapat menambatkan perahunya dengan baik dan aman untuk selanjutnya dapat membongkar muatan perahunya tersebut ketempat pelelangan ikan dengan mudah. Dermaga yang dimiliki oleh TPI Rajawali ini didirikan pada tahun 1970 dengan ukuran panjangnya yaitu 40 meter dengan konstruksi permanen (beton).

b. Gedung Tempat Pelelangan

Untuk kelancaran pelaksanaan lelang tentunya diperlukan suatu tempat yang baik, sehingga pelaksanaan lelang tersebut dapat dilakukan dengan baik dan teratur. TPI Rajawali memiliki gedung tempat pelelangan ikan yang dibayar secara permanen yang berukuran 40 x 20 meter dengan konstruksi dan peralatannya memang khusus untuk digunakan sebagai tempat pelelangan ikan. Gedung tempat pelelangan ini mampu memuat sebanyak 300 orang nelayan yang melakukan penjualan hasil tangkapannya.

c. Locket

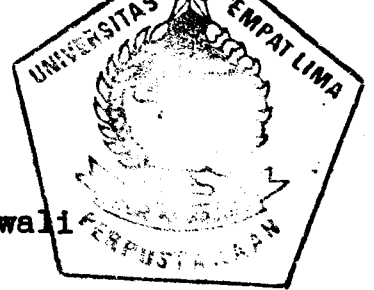
Untuk mempermudah para nelayan dalam melakukan pembayaran retribusi dari hasil penjualan dan hasil tangkapannya maka TPI Rajawali menyediakan sarana tempat pembayaran retribusi berupa loket-loket ini berkontruksi permanen dengan ukuran 3 x 1 meter.

d. Kantor

Dalam usaha meningkatkan koordinasi, pengembangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Rajawali ini, tersedia sebuah kantor dengan kontruksi permanen, yang berukuran 10 x 12 meter. Seluruh kegiatan administratif tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan dilakukan di kantor ini, kantor ini dilengkapi dengan barang inventaris seperti : Meja, Kursi, Lemari Arsip, Pesawat Telepon, Mesin Ketik, Mesin Hitung serta papir potensi dan barang inventaris lainnya yang dibutuhkan untuk sebuah kantor.

e. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang terlihat dalam kegiatan pelelangan ikan yang merupakan personil tetap dari TPI Rajawali adalah sebanyak 24 orang, yang terdiri dari tenaga administratif 4 orang yaitu Kepala Sub. Unit sendiri dan 3 orang tenaga kepala bagian yang tugasnya bersifat administratif, sedang 20 orang tenaga kerja lainnya merupakan tenaga kerja lapangan yang bertugas secara langsung.



4.3. Perkembangan Kegiatan Di TPI Rajawali

Jenis ikan yang dijual melalui penjualan ikan tersebut terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu ikan laut yang dihasilkan oleh para nelayan yang melakukan dilaut lepas itu untuk melakukan penangkapan ikan baik dari dalam Kotamadya Ujung Pandang sendiri, maupun dari nelayan daerah-daerah sekitarnya, jenis yang kedua yaitu jenis ikan hasil tambak dari dalam Kotamadya Ujung Pandang, maupun berasal dari luar daerah ini.

Dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat kecenderungan volume ikan yang dijual melalui pelelangan ikan Rajawali mengalami peningkatan, dari tahun ketahun baik volume ikan laut, dan ikan tambak.

Gambaran tentang volume kegiatan atau penjualan ikan melalui TPI Rajawali untuk setiap jenis ikan dari tahun 1986 - 1990 dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2 : Volume Penjualan Ikan Melalui TPI Rajawali Untuk Setiap Jenis Ikan Tahun 1986 - 1990

Tahun	Pendapatan Jenis Ikan (Ton)		Jumlah
	Ikan Laut	Ikan Tambak	
1986	205,798	190,349	396,192
1987	332,808	250,975	583,783
1988	485,966	296,057	782,023
1989	546,571	355,452	902,023
1990	555,783	366,385	922,168

Sumber Data : Kantor TPI Rajawali Ujung Pandang

Dari tabel tersebut dilihat bahwa dari tahun 1986 volume ikan melalui TPI Rajawali sampai tahun 1990 menunjukkan angka yang meningkat dari tahun 1986 - 1987 meningkat sekitar 1,47 %, juga meningkat dari tahun 1987 - 1988 sekitar 1,33 % dan tahun 1988 - 1989 meningkat sekitar 1,15 %, serta tahun 1989 - 1990 meningkat pula sekitar 1,02 %

Khususnya penjualan ikan laut dari tahun 1986 - 1990 mengalami peningkatan terus menerus dari tahun ketahun, yaitu dari tahun 1986 - 1987 meningkat sekitar 1,61 %, tahun 1987 - 1988 meningkat pula sekitar 1,46 %, dan tahun 1988 - 1989 meningkat sekitar 1,12%, serta tahun 1989 - 1990 meningkat menjadi 0,01.

Begitu pula volume penjualan ikan tambak dari tahun 1986 - 1987 meningkat sekitar 1,31%, tahun selanjutnya tahun 1987 - 1988 meningkat sekitar 1,17%, dan meningkat pula dari tahun 1988 - 1989 sekitar 1,20 %, serta tahun 1989 - 1990 meningkat sekitar 1,03 %.

Secara keseluruhan volume ikan laut yang ada di TP Rajawali lebih meningkat dibanding dengan ikan tambak dalam volume pendapatan kedua jenis ikan perton dari akhir tahun 1986 - 1990 tersebut.

4.4. Perkembangan Penerimaan Penjualan Ikan di TPI Rajawali

Dengan adanya peningkatan perkembangan kegiatan di TPI Rajawali yaitu dengan meningkatnya volume kegiatan ikan baik ikan laut maupun ikan tambak dari tahun ketahun belakangan ini membawa pengaruh positif terhadap penerimaan hasil penjualan tersebut dalam priode yang sama dimana hasil nelayan dan petani tambak terhadap hasil tangkapannya, lalu mengalami peningkatan seperti digambarkan tabel sebagai berikut ini :

Tabel 3 : Perkembangan Hasil Penjualan Ikan Di TPI Rajawali Untuk Setiap Jenis Ikan Dari Tahun 1986 - 1990.

Tahun	Hasil Penjualan Ikan (Rp)		Jumlah
	Ikan Laut	Ikan Tambak	
1986	269.919.540	227.865.220	497.784.760
1987	449.180.160	296.011.820	745.191.980
1988	668.161.090	355.229.600	1023.390.690
1989	713.127.850	331.836.980	1044.964.830
1990	805.931.710	456.237.630	1271.169.340

Sumber Data : Kantor TPI Rajawali Ujung Pandang.

Dari tabel diatas menunjukkan sejak tahun 1986 hasil penjualan ikan melalui TPI Rajawali senantiasa memperlihatkan angka yang meningkat baik penjualan ikan laut maupun penjualan ikan tambak, dengan keseluruhan sampai tahun 1990 meningkat dari tahun 1986 - 1987 menjadi 0,66% dari tahun

1987 -1988 meningkat sekitar 0,72% dan dari tahun 1988 - 1989 meningkat menjadi 1,02% serta dari tahun 1989 - 1990 meningkat sekitar 1,21%.

Khususnya untuk penjualan ikan laut dari tahun 1986 -1987 mengalami peningkatan sekitar 1,66%, tahun 1987 - 1988 meningkat menjadi 1,48% dan tahun 1988 -1989 meningkat menjadi 1,06% serta tahun 1989 - 1990 menjadi 1,13%,

Gambaran tentang harga penjualan rata-rata ikan laut untuk setiap ton dari tahun 1986 - 1990 di TPI Rajawali dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 . Harga Jual Rata-rata Ikan Laut Setiap Ton Di TPI Rajawali Tahun 1986 - 1990.

Tahun	Jumlah Penjualan (Rp)	Volume Penjualan Ton	Harga Rata-rata Per Ton (Rp)
1986	264.919.540	205,798	1.312.200
1987	449.180.160	332,808	1.349.700
1988	668.161.090	485,966	1.375.100
1989	713.127.850	546,571	1.304.900
1990	805.931.710	555,783	1.450.300

Sumber : Data Diolah Sendiri

Berdasarkan data diatas, berkembang dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir ini senantiasa mengalami perubahan dan cenderung mengalami peningkatan, kecuali harga dari tahun 1988 ketahun 1989 mengalami penurunan sebesar

Rp 70.200 per ton atau turun sekitar 5,1% dari tahun sebelumnya, karena dipengaruhi oleh musin. Adapun harga jual ikan laut dari tahun 1986 ketahun 1987 meningkat sebesar 1,02% atau sebesar Rp 37.500 per ton, dari tahun 1987 ketahun 1988 naik sebesar Rp 25.400 per ton (1,01%), kenaikan harga jual ikan laut dari tahun 1989 ke tahun 1990 cukup besar yakni mencapai sekitar Rp 145.400 per ton (1,11%).

Seperti halnya dengan ikan laut maka meskipun dari tahun 1987 - 1988 penurunan volume penjualan ikan tambak, namun hal tersebut tidaklah menurunkan hasil penjualan ikan tambak dari periode sebelumnya. Itu juga disebabkan pula karena harga jual ikan tambak pada saat itu juga mengalami kenaikan mengakibatkan hasil penjualan mengalami peningkatan.

Gambaran tentang perkembangan harga jual rata-rata ikan tambak setiap ton di TPI Rajawali dari tahun 1986-1990 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 : Harga Jual Rata-Rata Ikan Tambak Setiap Ton di TPI Rajawali Dari Tahun 1986-1990

Tahun	Jumlah Penjualan (Rp)	Volume Penjualan (Ton)	Harga Rata-Rata Per Ton (Rp)
1986	227.865.220	190,394	1.197.400
1987	296.011.820	250,975	1.179.800
1988	355.229.600	296,057	1.200.100
1989	331.836.980	355,452	933.700
1990	465.237.630	366,385	1.270.100

Sumber : Data Diolah Sendiri

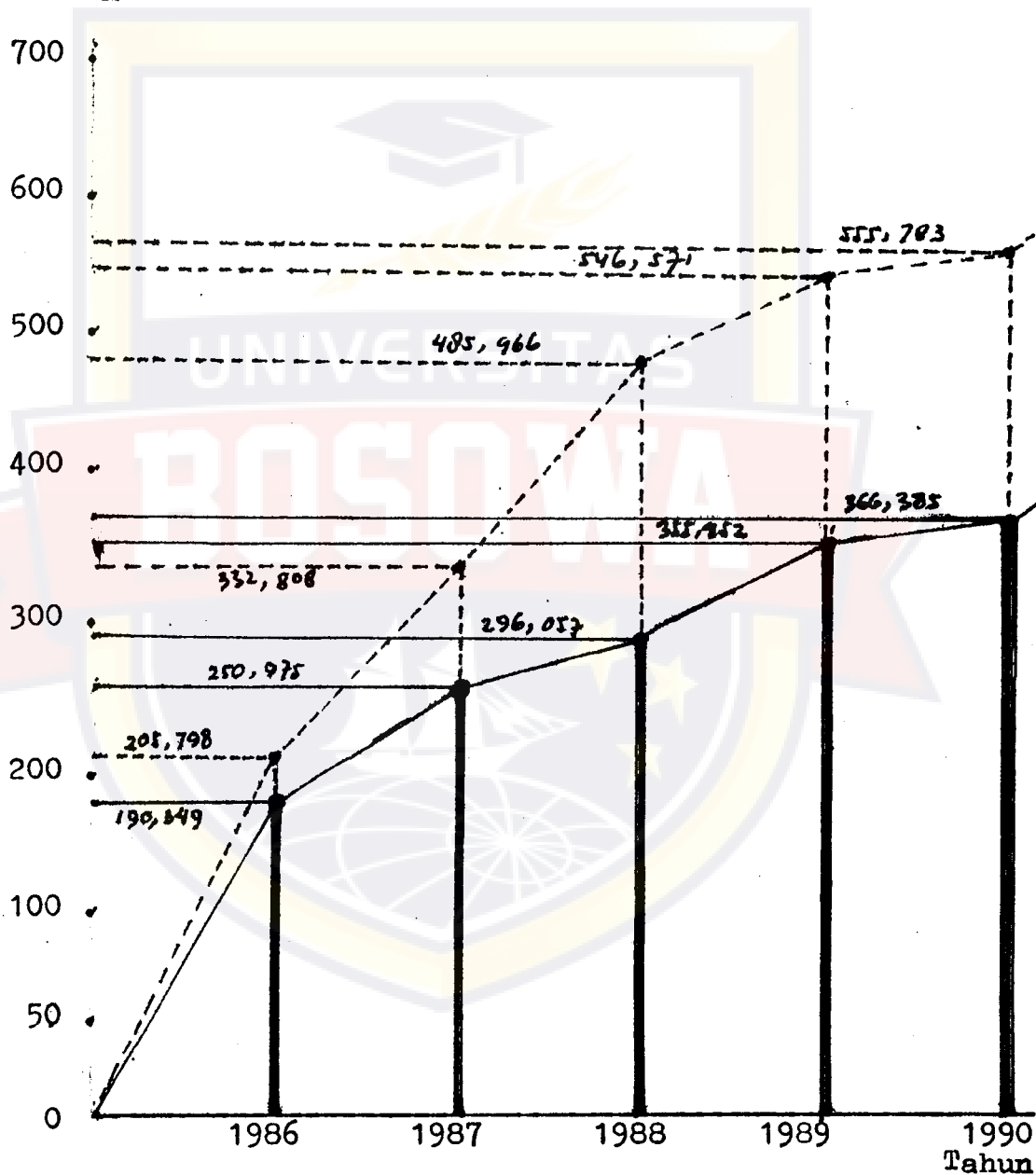
Seperti halnya dengan perkembangan ikan laut, maka perkembangan harga ikan tambak berfluktuasi dari tahun ke tahun, yakni dari tahun 1986 ke tahun 1987 harga jual rata-rata per ton sedikit mengalami penurunan yakni sebesar Rp 17.600 per ton atau turun sekitar 1,01%. Harga jual tahun 1987 tersebut meningkat pada tahun 1988 sebesar Rp 20.300 per ton (6,67%), namun harga ini hanya bertahan satu priode saja yakni dengan terjadinya penurunan harga jual rata-rata dalam tahun 1989 penurunan mana sebesar Rp 266.400 per ton (1,28%) dari tahun sebelumnya. Harga jual tersebut kembali menanjak dari tahun 1989 ke tahun 1990 dengan kenaikan harga mencapai sekitar Rp 336.400 per ton (1,36%) suatau kenaikan dengan harga yang cukup besar.

Meskipun demikian harga penjualan ikan diterima baik oleh para nelayan maupun para petani tambak dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir ini senantiasa memperlihatkan angka peningkatan, meskipun dalam setiap priode kadang-kadang terjadi penurunan harga jual, terutama untuk penjualan ikan tambak.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik maka pada grafik 1 sampai grafik 4 dapat terlihat perkembangan volume dan hasil penjualan ikan di TPI Rajawali dari tahun 1986 - 1990, baik hasil akan jenis ikan laut maupun jenis ikan tambak.

Grafik 1 : Perkembangan Volume Penjualan Ikan Per-
Jenis Di TPI Rajawali Dari Tahun 1986 -
1990.

Volume Penjualan
(Ton)

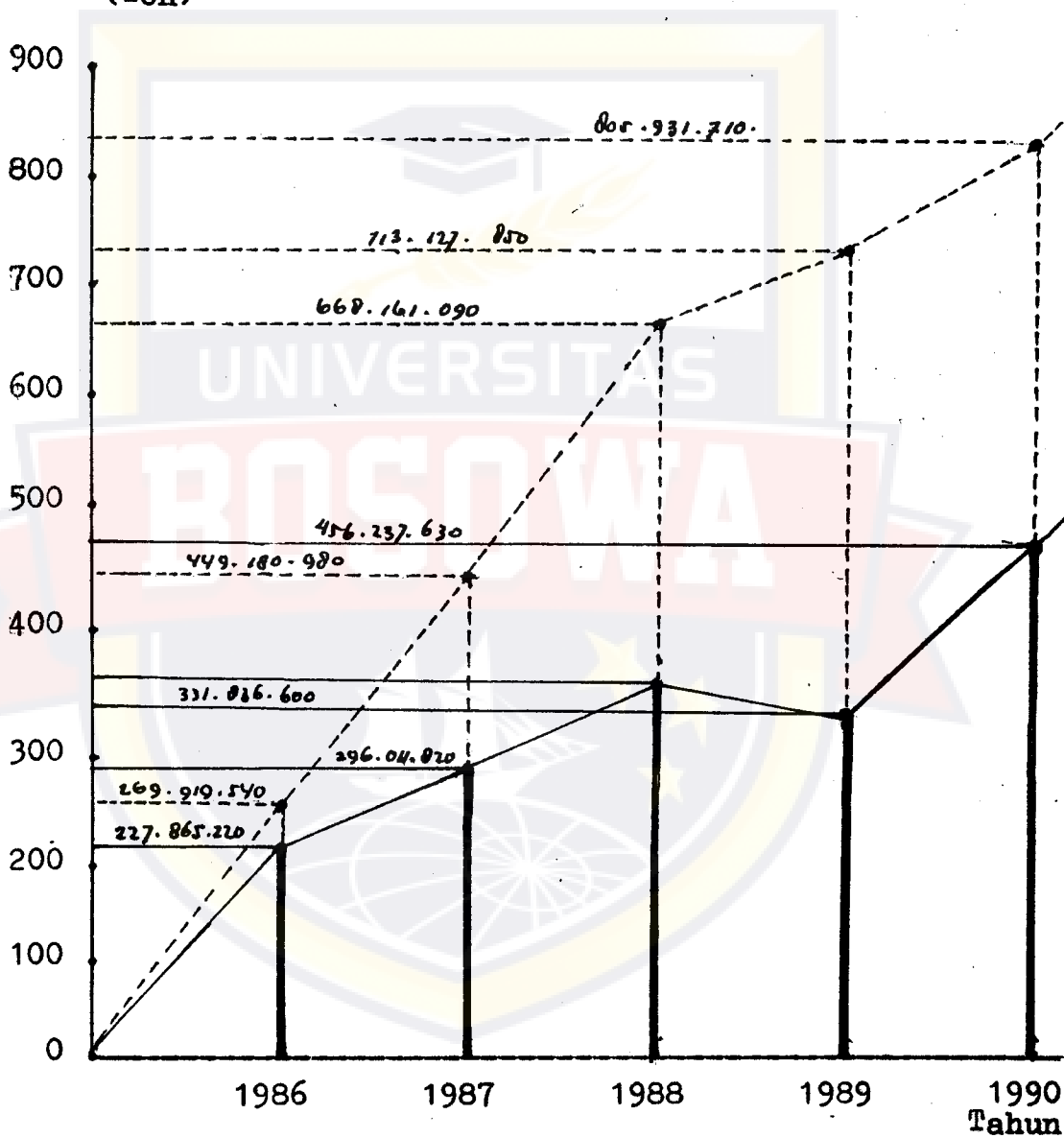


Keterangan : ----- : Ikan Laut

_____ : Ikan Tambak

Grafik 2 : Perkembangan Volume Penjualan Ikan Per-
Jenis Di TPI Rajawali Dari Tahun 1986 -
1990.

Volume Penjualan
(Ton)

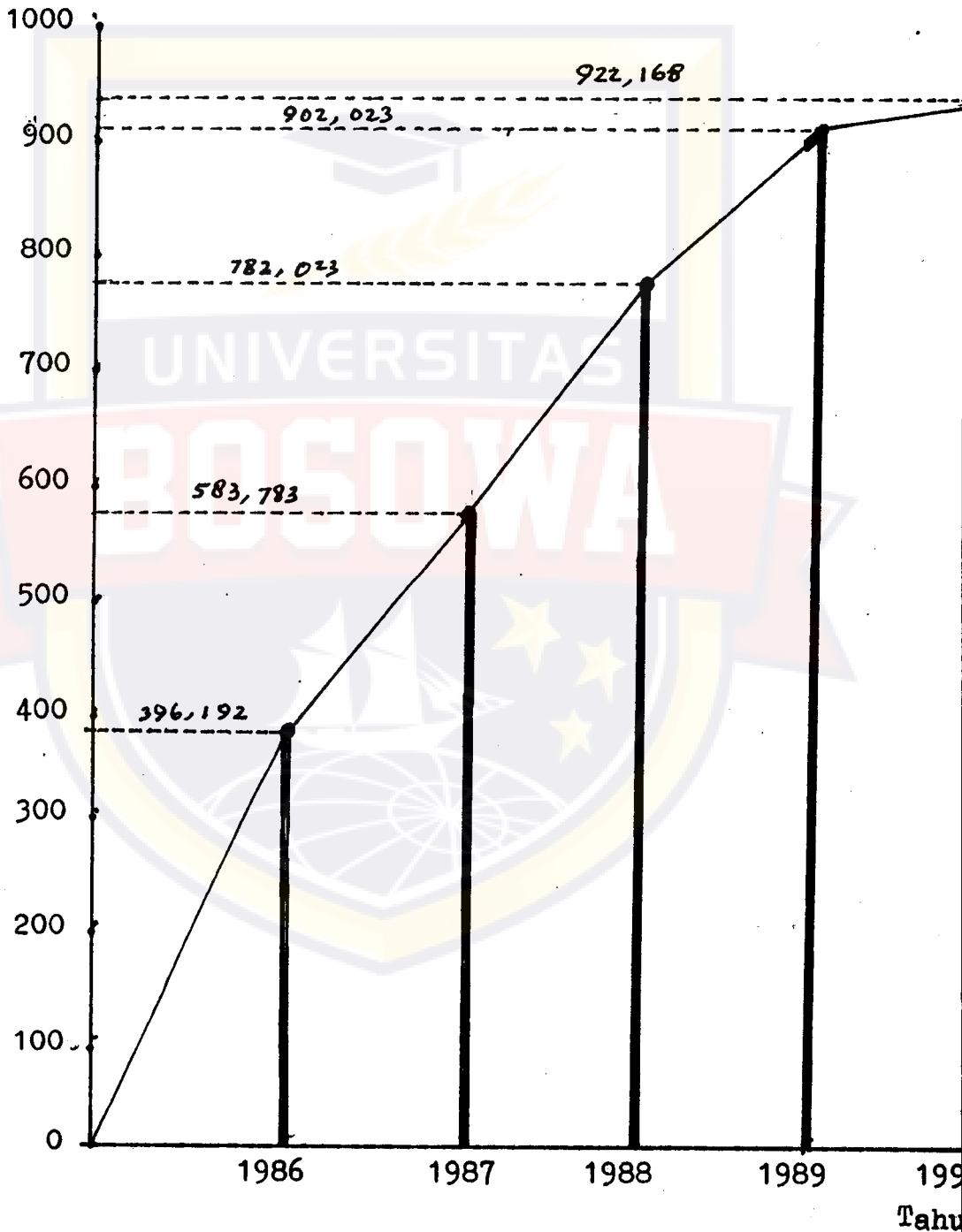


Keterangan : ----- : Ikan Laut

_____ : Ikan Tambak

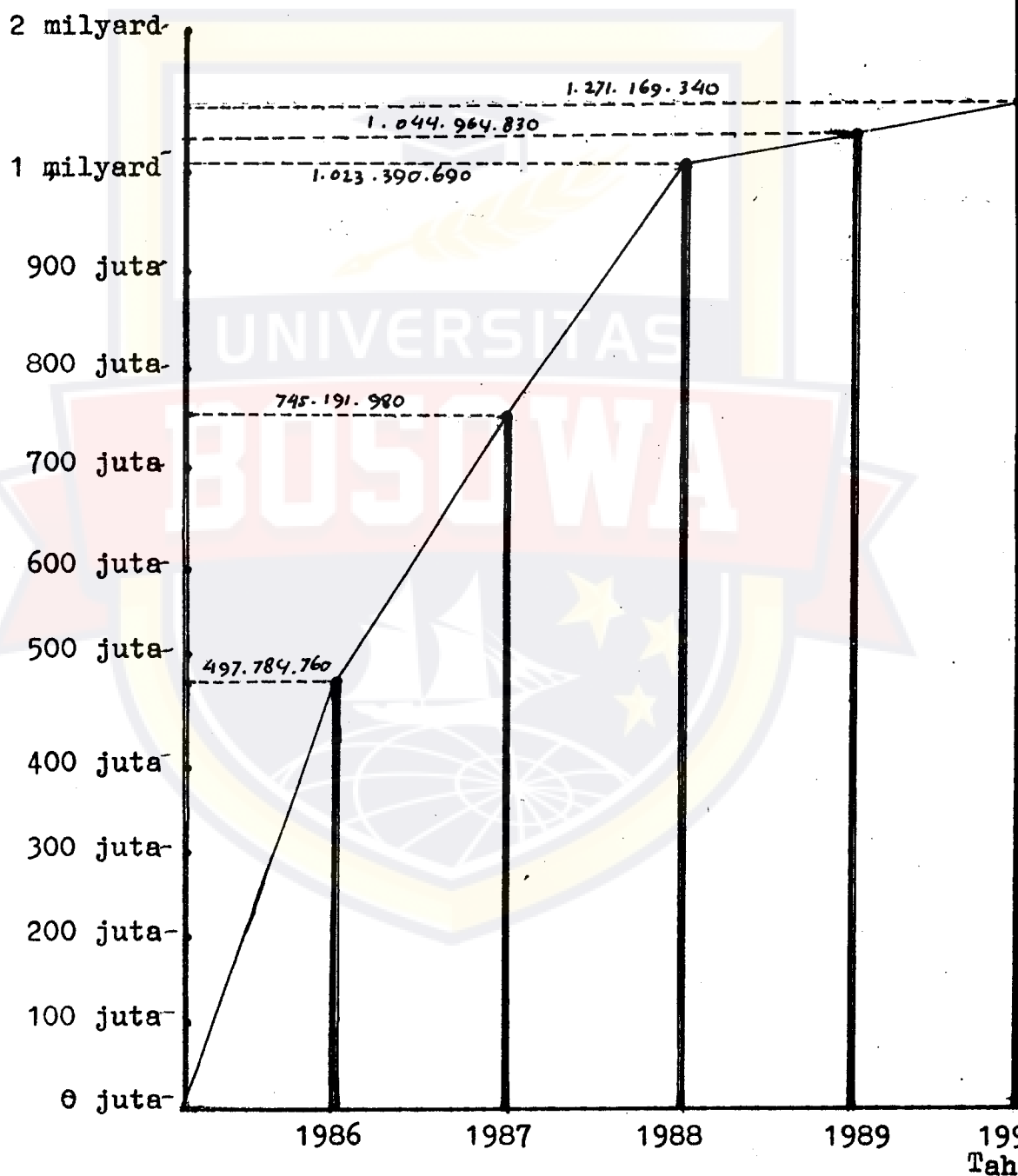
Grafik 3 : Perkembangan Volume Penjualan Ikan
Di TPI Rajawali Dari Tahun 1986 - 1990.

Volume Penjualan
(Ton)



Grafik 4 : Perkembangan Hasil Penjualan Ikan Di TPI Rajawali Dari Tahun 1986 - 1990.

Hasil Penjualan
(Milyard Rp)





BAB V

SUMBANGAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN RAJAWALI DAN PROYEKSI PENGEMBANGANNYA

5.1. Sumbangan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Rajawali

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa retribusi pelelangan ikan adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang dimana jumlah sumbangannya terhadap pembiayaan pembangunan di wilayah ini cukup besar dari sekian banyak macam hasil retribusi yang dipungut dari dalam Kotamadya Ujung Pandang ini.

Retribusi yang dipungut dari tempat pelelangan ikan didasarkan atas nilai penjualan ikan yang dilelang ditempat tersebut, sedang besarnya tarif retribusi tersebut ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 4 April pada Bab. III Pasal 2 sebagai berikut :

"Besarnya retribusi 10% dari hasil penjualan yang ditetapkan setelah lelang penaksiran yang dilakukan itu".

Dengan demikian setelah dilakukan pelelangan penaksiran dimana harga ikan yang dilelang itu telah diketahui, maka ditetapkanlah besarnya retribusi yang harus dibayarnya oleh pemilik ikan tersebut yakni 10% dari nilai ikan yang dijualnya.

Sebagai tanda bukti bahwa penjual ikan telah membay

retribusi, petugas penagihan memberikan tanda bukti dengan karcis sebagai pembayaran retribusi, bentuk karcis tersebut ditetapkan oleh Walikotaamadya Ujung Pandang seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1979 Bab III Pasal 2 dan 3 sebagai berikut ini :

"Pasal 2. Penagihan retribusi dimaksudkan pada ayat 1, pasal ini dilakukan dengan menggunakan karcis itu diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah Kotamadya Ujung Pandang.

Pasal 3. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang menetapkan bentuk-bentuk tanda khusus ini dimaksudkan ayat 2 pasal ini".

Hal ini berarti bahwa dalam hal pelelangan ikan dan pemungutan retribusinya baik menyangkut tata cara pemungutan atau penaksiran tarif retribusi itu sendiri sebenarnya telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui suatu peraturan daerah yang khusus dibuat untuk itu.

Tempat pelelangan ikan (TPI) Rajawali dalam tahun 1990 memberikan sumbangan retribusi terhadap pendapatan asli daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, yakni sebesar Rp 127.116.934,- retribusi ini merupakan 10% dari nilai penjualan ikan pada tahun 1990 di TPI Rajawali tersebut, penjualan mana mencapai nilai sebesar Rp 1.271.169.340,-.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan jumlah retribusi tempat pelelangan ikan TPI Rajawali terhadap pendapatan asli daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, seperti nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6 : Perkembangan Penerimaan Jumlah Retribusi TPI Rajawali Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 1986 - 1990.

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Jumlah Retribusi TPI Rajawali (Rp)	%
1986	4.766.005.937	49.778.476	1,04
1987	5.224.619.689	74.519.198	1,43
1988	5.577.254.080	102.339.069	1,83
1989	5.956.615.021	104.496.483	1,75
1990	9.448.339.155	127.116.934	1,35

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kotamadya Ujung Pandang

Pada tabel diatas kita melihat bahwa sumbangan TPI Rajawali terhadap pendapatan asli daerah Kotamadya Ujung Pandang, memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 1986 jumlah PAD Kotamadya Ujung Pandang sebesar Rp 4.766.055.937, sedang TPI Rajawali sebesar Rp 49.778.476, atau sebesar 1,04%, tahun 1987 jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 5.224.619.689, sedangkan TPI Rajawali mampu memasukkan sebesar Rp 74.519.198 atau sebesar 1,43%, pada tahun berikutnya yaitu tahun 1988 jumlah Pendapatan Asli Daerah sebanyak Rp 5.577.254.080, sedangkan TPI Rajawali menyumbangkan sebanyak Rp 102.339.069, atau sebesar 1,83% dan tahun 1989 jumlah PAD sebesar Rp 5.956.615.021, dan TPI menyumbangkan sebesar Rp 104.496.483, atau sebesar 1,75%, dan tahun

1990 PAD sebesar Rp 9.448.339.155, sedangkan pelelangan ikan Rajawali menyumbangkan sebesar Rp 127.116.934, atau sebesar 1,35%.

Sedangkan untuk melihat perkembangan jumlah retribusi di TPI Rajawali terhadap jumlah retribusi keseluruhan Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1986 - 1990, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 : Perkembangan Jumlah Penerimaan Retribusi TPI Rajawali Terhadap Retribusi Keseluruhan Kotamadya Ujung Pandang.

Tahun	Jumlah Retribusi Keseluruhan (Rp)	Jumlah Retribusi TPI Rajawali (Rp)	%
1986	2.600.200.195	49.778.476	1,91
1987	2.993.093.579	74.519.198	2,49
1988	2.560.129.683	102.339.069	4,0
1989	2.778.919.276	104.496.483	3,76
1990	3.116.034.555	127.116.934	4,08

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan perkembangan jumlah retribusi TPI Rajawali terhadap retribusi secara keseluruhan, yang mana dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pada tahun 1986 jumlah retribusi Kotamadya Ujung Pandang sebesar Rp 2.600.200.195, sedangkan TPI Rajawali mampu memasukkan retribusi sebanyak Rp 49.778.476 atau sekitar 1,9 pada tahun selanjutnya tahun 1987 jumlah retribusi Kotamadya

4

Ujung Pandang sebesar Rp 2.993.093.579, sedangkan TPI Rajawali menyumbangkan sebanyak Rp 74.519.198 atau sekitar 2,5% dan tahun 1988 retribusi Kotamadya Ujung Pandang sebanyak Rp 2.560.129.683, dan TPI Rajawali memasukkan retribusi sebanyak Rp 102.339.069 atau sekitar 4,0%, untuk tahun 1989, TPI Rajawali mampu menyumbangkan sebesar Rp 104.496.483 atau sekitar 3,76% dari jumlah keseluruhan retribusi Kotamadya Ujung Pandang, serta pada tahun 1990 jumlah retribusi Kotamadya Ujung Pandang sebesar Rp 3.116.034.555, sedangkan TPI Rajawali memasukkan retribusi sebesar Rp 127.116.934, atau sekitar 4,08% dari jumlah seluruhnya.

Hal ini membuktikan bahwa sumbangan yang diberikan oleh TPI Rajawali cukup berarti dan senantiasa menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir ini, hal ini berarti bahwa biaya-biaya pembangunan daerah ini dari tahun ketahun semakin meningkat dan banyak yang dapat diharapkan dari pelelangan ikan tersebut melalui pemungutan retribusi.

Beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan peningkatan volume penjualan dan kegiatan pelelangan ikan pada umumnya dan TPI Rajawali pada khususnya adalah antara lain sebagai berikut :

1. Pemakaian sarana penangkapan ikan oleh para nelayan dari waktu ke waktu semakin modern.
2. Terdapat kecenderungan nelayan-nelayan dari daerah lain sekitar Kotamadya Ujung Pandang untuk datang menjual hasil tangkapannya di TPI Rajawali tersebut.

3. Terdapatnya usaha-usaha mekanisasi tambak dalam tahun-tahun terakhir ini.

Ketiga faktor tersebut merupakan faktor-faktor utama yang merupakan indikasi peningkatan penjualan ikan pada tempat pelelangan ikan dalam wilayah daerah Kotamadya Ujung Pandang, sedangkan faktor-faktor penghambat tidak mempengaruhi kegiatan pelelangan ikan serta kelancaran dan peningkatan penjualan ikan, khususnya ditempat pelelangan ikan Rajawali tersebut.

5.2. Proyeksi Pengembangan Kegiatan TPI Rajawali

Dalam memproyeksi atau memperkirakan volume kegiatan atas penjualan ikan yang dilakukan di TPI Rajawali Kotamadya Ujung Pandang tahun 1991 - 1995, yang akan datang digunakan Analisa Time Series dalam bentuk garis persamaan garis linier sederhana dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

Dimana :

Y = Jumlah volume penjualan ikan

X = Priode (waktu)

a = Konstante (tetap)

b = Koefisien regresi

Dalam melakukan proyeksi volume penjualan ikan ini digunakan beberapa asumsi, antara lain :

- a. Dalam tahun-tahun menurut proyeksi tidak terdapat peningkatan secara drastis terhadap pemakaian peralatan baik,

- peralatan mekanik (tehnologi) untuk penangkapan ikan, baik peralatan penangkapan yang digunakan oleh nelayan maupun yang digunakan untuk penangkapan ikan di tambak.
- b. Tidak terjadi suatu kondisi yang tidak diduga misalnya, terjadi pencemaran laut yang hebat, sehingga menyebabkan punahnya ikan di laut, atau terjadinya bencana alam banjir sehingga tambak (empang), tidak dapat menghasilkan ikan.
 - c. Tidak terjadi perubahan yang drastis terhadap jumlah nelayan atau petani tambak yang memanfaatkan TPI Rajawali sebagai tempat penjualan hasil tangkapannya.

Dengan memperhatikan data historis volume penjualan ikan di TPI Rajawali dari tahun 1986 sampai tahun 1990, maka dapat dilakukan prakiraan volume penjualan ikan tahun-tahun yang akan datang yaitu dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1995 dengan tehnik perhitungan sebagai berikut :

Tabel 8 : Perhitungan Proyeksi Volume Penjualan Ikan Di TPI Rajawali dari tahun 1991 - 1995.

Tahun	Volume Penjualan (Ton) Y	X	XY	X ²
1986	396,192	0	0	0
1987	583,783	1	583,783	1
1988	782,023	2	1.564,046	4
1989	902,023	3	2.706,069	9
1990	922,168	4	3.688,672	16
Jumlah	3.568,189	10	8.542,570	30

Sumber : Data Diolah Sendiri

Oleh karena terdapat 2 (dua) variabel yang tidak diketahui yaitu variabel a dan variabel b , maka persamaan ini yang digunakan adalah dua variabel persamaan normal sebagai berikut :

$$I. \quad \sum Y = N a + b \sum x$$

$$II. \quad \sum XY = a \sum x + b \sum x^2$$

$$I. \quad 3586,189 = 5 a + 10 b \quad \dots\dots 2x$$

$$II. \quad 8542,570 = 10 a + 30 b \quad \dots\dots 1x$$

$$I. \quad 8542,570 = 10 a + 30 b$$

$$II. \quad 7172,378 = 10 a + 20 b \quad -$$

$$1370,192 = 10 b$$

$$10 b = 1370,192$$

$$b = \frac{1370,192}{10} = 137,019$$

10

$$b = 137,019 \text{ ton}$$

Dengan diketahuinya nilai b , maka nilai tersebut dimasukkan kedalam persamaan sebagai berikut :

$$\sum Y = N a + b \sum x$$

$$3586,189 = 5 a + 137,019 \quad (10)$$

$$3586,189 = 5 a + 1370,19$$

$$5 a = 3586 - 1370,19$$

$$5 a = 2215,99$$

$$a = \frac{2215,99}{5} = 443,19$$

5

$$a = 443,19$$

5

Sehingga persamaan trendnya menjadi :

$$Y = 443,19 + 137,019 \quad (x)$$

Jadi proyeksi tahun 1991

$$\begin{aligned} Y &= 443,19 + 137,019 \quad (5) \\ &= 1128,285 \end{aligned}$$

Untuk proyeksi tahun 1992

$$\begin{aligned} Y &= 443,19 + 137,019 \quad (6) \\ &= 1.265,403 \end{aligned}$$

Untuk proyeksi tahun 1993

$$\begin{aligned} Y &= 443,19 + 137,019 \quad (7) \\ &= 1.402,323 \end{aligned}$$

Untuk proyeksi tahun 1994

$$\begin{aligned} Y &= 443,19 + 137,019 \quad (8) \\ &= 1.539,342 \end{aligned}$$

Untuk proyeksi tahun 1995

$$\begin{aligned} Y &= 443,19 + 137,019 \quad (9) \\ &= 1.676,361 \end{aligned}$$

Dari hasil persamaan regresi sederhana diatas sebagai dasar perhitungan, maka proyeksi volume penjualan ikan di TPI Rajawali pada tahun 1991 sampai tahun 1995, seperti nampak pada tabel berikut :

Tabel 9 : Hasil Proyeksi Volume Penjualan Ikan Di-TPI Rajawali Dari Tahun 1991 - 1995.

Tahun	Volume Penjualan (Ton)
1991	1.128,285
1992	1.265,304
1993	1.402,323
1994	1.539,342
1995	1.676,361

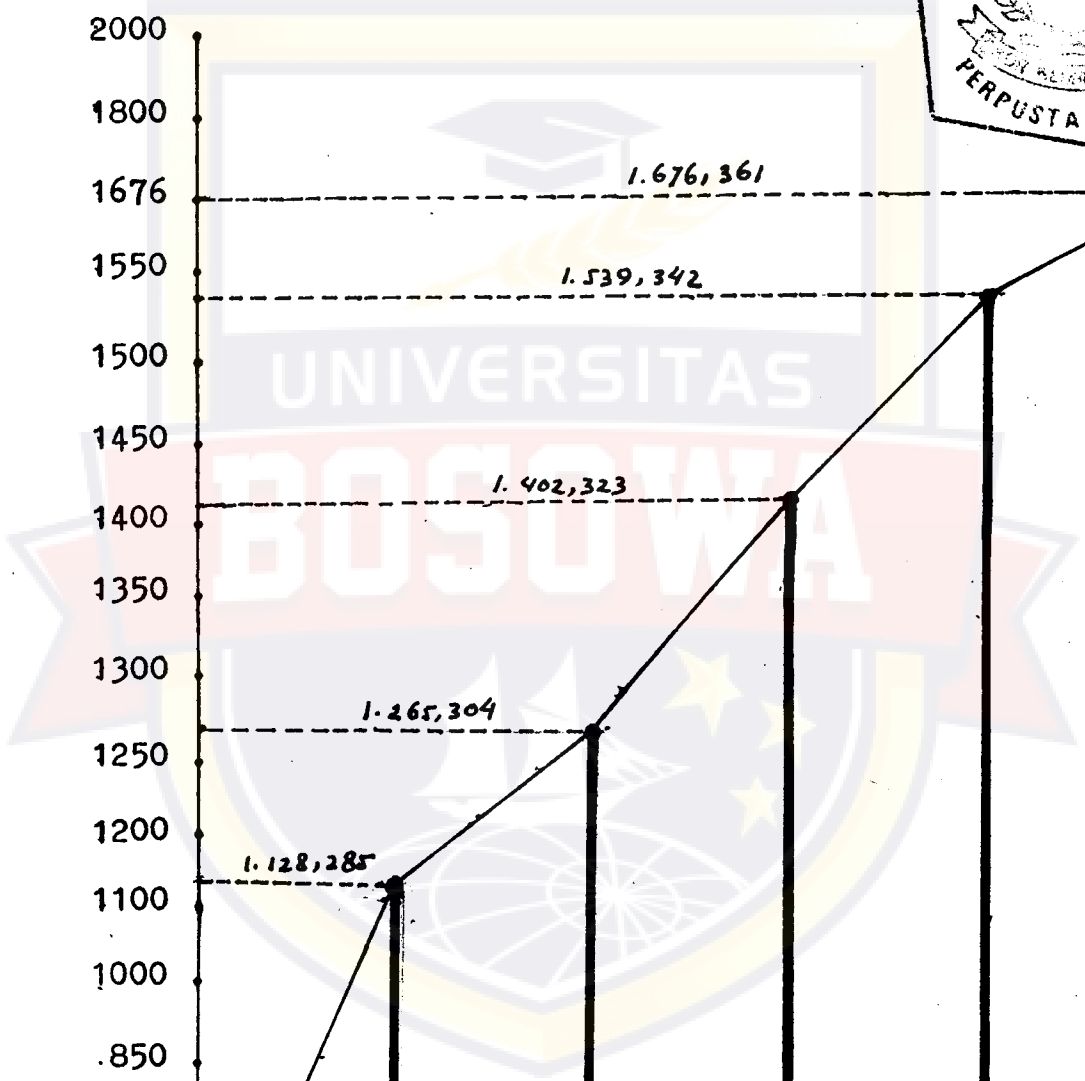
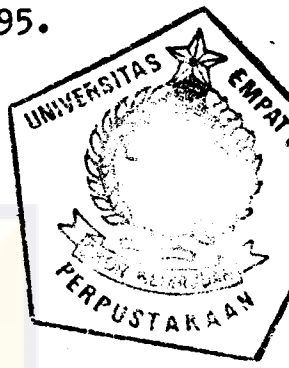
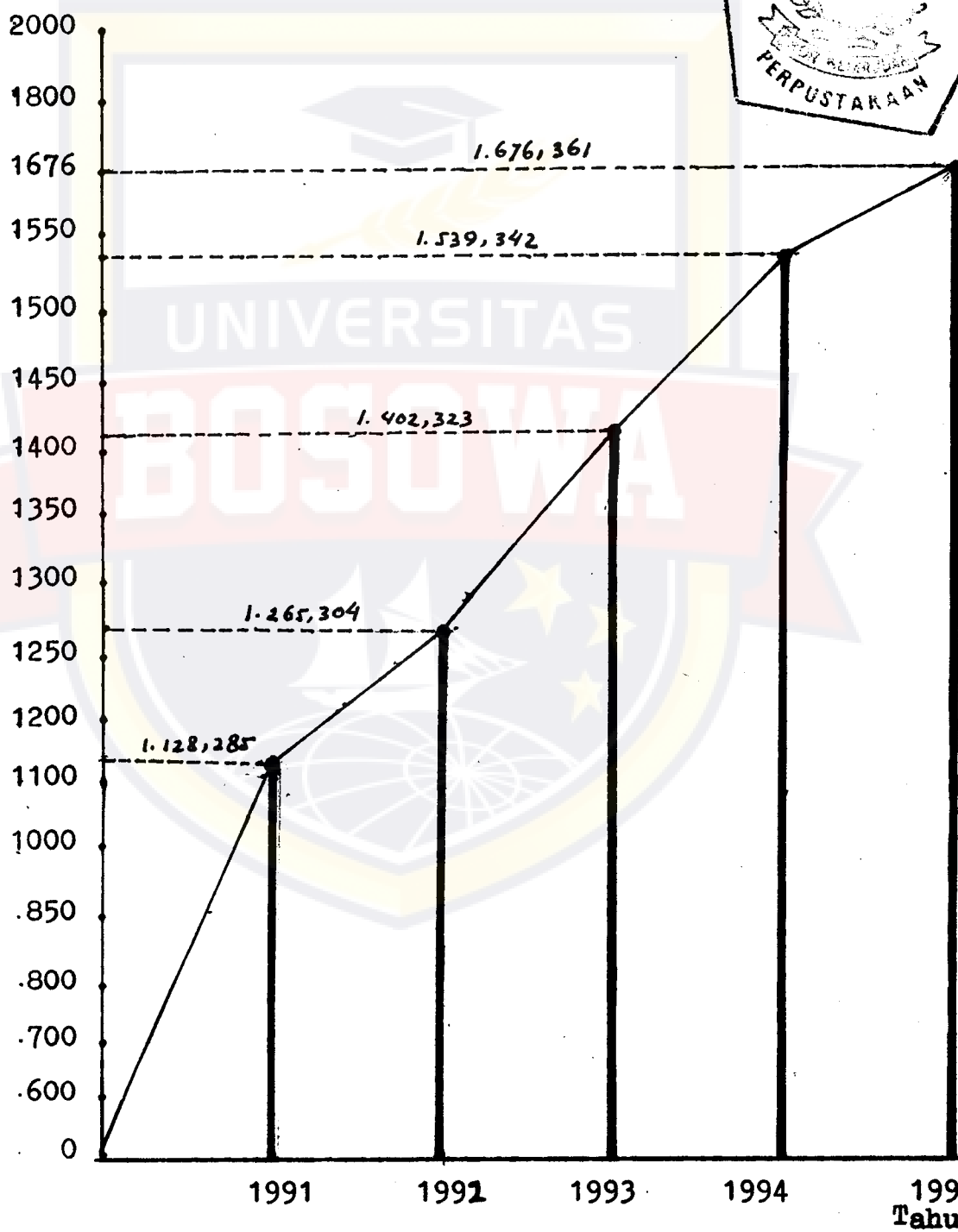
Sumber : Data Diolah Sendiri

Dengan demikian volume penjualan ikan di TPI Rajawali dalam lima tahun mendatang akan terus mengalami peningkatan dimana diperkirakan dalam tahun 1995, volume penjualan ikan tersebut akan mencapai sekitar 1.676,361 ton.

Garis trend perkembangan volume penjualan ikan di TPI Rajawali dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1995 dapat dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Grafik 5 : Proyeksi Penjualan Ikan Di TPI -
Rajawali Tahun 1991 - 1995.

Volume Penjualan
(Ton)



199
Tahu

Kaitannya dengan jumlah penduduk di Kotamadya Ujung Pandang dalam tahun 1995 tingkat pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahun 1980 sampai dengan tahun 1990, maka diperoleh bahwa volume penjualan ikan dari TPI Rajawali ini perkapita penduduk mencapai sebesar 8,7% per kg, sedangkan pada tahun 1990 volume penjualan ikan di TPI Rajawali ini perkapita penduduk mencapai sebesar 1,8% per kg. Hal ini berarti volume penjualan ikan dalam tahun-tahun mendatang perkapita penduduk akan mengalami kenaikan, kondisi ini dapat dikaitkan dengan semakin membaiknya semua sarana penangkapan ikan yang digunakan baik nelayan maupun petani tambak.

Dengan diketahuinya hasil proyeksi volume penjualan ikan di TPI Rajawali dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1995, maka dengan sendirinya perkembangan hasil penjualan ikan dalam priode yang bersangkutan dapat pula diketahui, namun sebelum dilakukan proyeksi hasil penjualan ikan tersebut terlebih dahulu harus diproyeksikan harga satuan penjualan ikan itu sendiri untuk setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena terdapat kecendrungan adanya perubahan harga jual ikan dari satu priode ke priode lainnya.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi harga ikan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Tidak terdapat perubahan yang cukup drastis penduduknya

- b. Tidak terdapat perubahan selera penduduk terhadap ikan yang menyolok
- c. Tidak terdapat substitusi terhadap ikan
- d. Tingkat pendapatan masyarakat tidak mengalami perubahan yang menyolok

Seperti halnya dengan teknik perhitungan proyeksi yang telah dilakukan, untuk melakukan proyeksi ikan untuk tahun-tahun mendatang haruslah terlebih dahulu diperhatikan data historis dari harga ikan tersebut dalam periode sebelumnya. Dengan diketahuinya data harga ikan tersebut maka perhitungan proyeksi harga ikan untuk periode tahun 1991 - 1995 nampak seperti tabel berikut ini :

Tabel 10 : Perhitungan Proyeksi Harga Ikan Setiap Tahun Di TPI Rajawali Dari Tahun 1991 - 1995.

Tahun	Harga Jual Per-Ton (Rp) Y	X	XY	X ²
1986	1.427.860	0	0	0
1987	1.451.000	1	1.451.000	1
1988	1.474.140	2	2.948.280	4
1989	1.497.280	3	4.491.840	9
1990	1.520.420	4	6.081.680	16
Jumlah	7.370.700	10	14.972.800	30

Sumber : Data Diolah Sendiri

Seperti halnya dengan tehnik perhitungan sebelumnya maka untuk mengetahui nilai a dan b, digunakan Formulasi sebagai berikut :

$$I. \quad \sum Y = N a + b \sum x$$

$$II. \quad \sum XY = a \sum x + b \sum x^2$$

$$I. \quad 7.370.700 = 5 a + 10 b \quad \dots\dots\dots 2x$$

$$II. \quad 14.972.800 = 10 a + 30 b \quad \dots\dots\dots 1x$$

$$I. \quad 14.972.800 = 10 a + 30 b$$

$$II. \quad 14.741.400 = 10 a + 20 b \quad \underline{\quad}$$

$$231.400 = 10 b$$

$$b = \frac{231.400}{10} = 231.40$$

$$b = 231.40$$

Selanjutnya untuk mencari nilai a, maka nilai b dimasukkan kedalam persamaan sebagai berikut :

$$\sum Y = N a + b \sum x$$

$$7.370.700 = 5 a + 23.140 \quad (10)$$

$$7.370.700 = 5 a + 231.400$$

$$7.370.700 = 231.400 = 5 a$$

$$5 a = 7.139.300$$

$$a = \frac{7.139.300}{5} = 1.427.860$$

$$a = 1.427.860$$

Persamaan trendnya menjadi :

$$Y = a + bx$$

$$Y = 1.427.860 + 231.40 (x)$$

Jadi proyeksi untuk tahun 1991

$$\begin{aligned} Y &= 1.427.860 + 23.140 & (5) \\ &= 1.543.560 \end{aligned}$$

Untuk proyeksi tahun 1992

$$\begin{aligned} Y &= 1.427.860 + 23.140 & (6) \\ &= 1.566.700 \end{aligned}$$

Untuk proyeksi tahun 1993

$$\begin{aligned} Y &= 1.427.860 + 23.140 & (7) \\ &= 1.589.840 \end{aligned}$$

Untuk proyeksi tahun 1994

$$\begin{aligned} Y &= 1.427.860 + 23.140 & (8) \\ &= 1.612.980 \end{aligned}$$

Untuk proyeksi tahun 1995

$$\begin{aligned} Y &= 1.427.860 + 23.140 & (9) \\ &= 1.636.120 \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan trend diatas, maka proyeksi harga penjualan ikan di TPI Rajawali untuk setiap ton dalam priode tahun 1991 sampai tahun 1995, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11 : Hasil Proyeksi Harga Penjualan Setiap Ton Ikan Di TPI Rajawali Dari Tahun 1991-1995

Tahun	Harga Penjualan Per (Ton) (Rp)
1991	1.543.560
1992	1.566.700
1993	1.589.840
1994	1.612.980
1995	1.636.120

Sumber : Data Hasil Proyeksi Sendiri

Hasil proyeksi ini menunjukkan bahwa disamping volume penjualan ikan di TPI Rajawali dalam beberapa tahun mendatang senantiasa mengalami peningkatan, juga harga jual setiap ton dari ikan itu sendiri juga mengalami peningkatan yang berarti bahwa penjualan yang bakal diterima oleh para petani tambak dan nelayan-nelayan dari hasil penjualan ikan dan akan mengalami peningkatan. Namun karena para nelayan itu sejak dahulu memang sudah berada digaris kemiskinan, maka peningkatan pendapatan yang diterima oleh para nelayan tersebut belum dapat menjamin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, hal ini disebabkan karena setiap kenaikan pendapatan yang diperolehnya seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik atau kebutuhan sehari-hari mereka.

Dengan diketahuinya volume penjualan ikan di TPI Rajawali pada (tabel 9), dan proyeksi harga jual ikan tersebut setiap tahunnya (tabel 11), maka nilai penjualan ikan di TPI Rajawali untuk lima tahun mendatang dapat diperkirakan seperti nampak pada tabel 12 berikut ini :

Tabel 12 : Proyeksi Nilai Penjualan Ikan Di TPI Rajawali dari tahun 1991 - 1995.

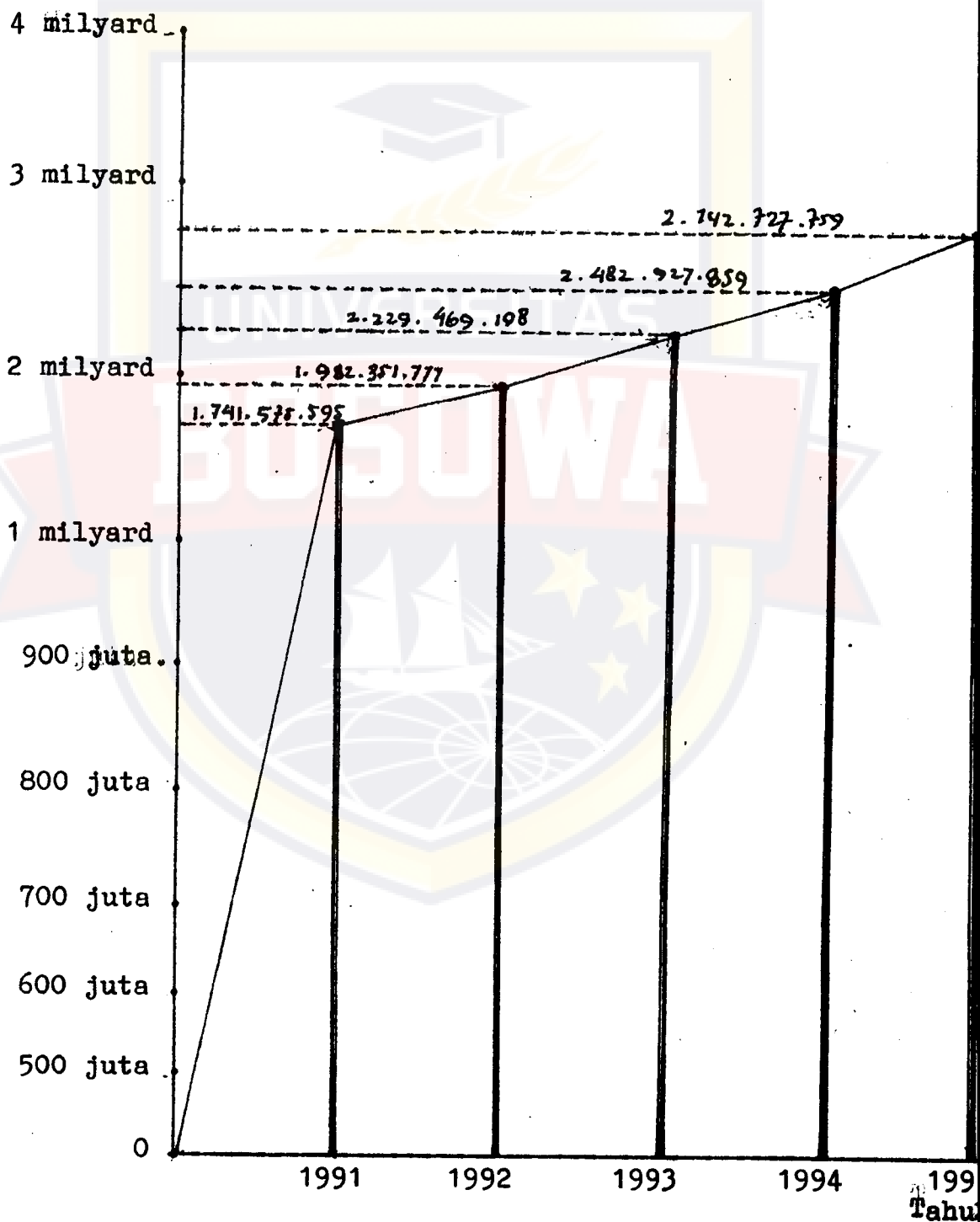
Tahun	Volume Penjualan (Ton)	Harga Penjualan Per (Ton) (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
1991	1.128,285	1.543.560	1.741.575,59
1992	1.265,304	1.566.700	1.982.351.77
1993	1.402,323	1.589.840	2.229.469.19
1994	1.539,342	1.612.980	2.482.927.85
1995	1.676.361	1.636.120	2.742.727.75

Sumber : Data Diolah Sendiri

Jika perkembangan perkiraan nilai penjualan ikan di TPI Rajawali tersebut digambarkan dalam bentuk grafik, maka nampak sebagai berikut :

Grafik 6 : Proyeksi Nilai Penjualan Ikan Di TPI
Rajawali Dari Tahun 1991 - 1995.

Nilai Penjualan
(Milyard Rp)



Dengan demikian hasil proyeksi nilai penjualan yang dapat diperoleh melalui TPI Rajawali dari tahun 1991 - 1995 tersebut, nilai penjualan mana dari tahun ke tahun memperlihatkan angka yang meningkat, maka harapan pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang untuk memperoleh pungutan retribusi pelelangan ikan menjadi semakin besar untuk dapat membiayai pembangunan wilayah ini yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Dengan asumsi bahwa tarif retribusi dalam jangka waktu lima tahun mendatang tetap sama dengan tarif yang diberlakukan sekarang yaitu sebesar 10% dari nilai penjualan ikan yang dilelang, maka perkiraan pendapatan retribusi pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang dari retribusi TPI Rajawali ini dalam lima tahun mendatang yakni dari tahun 1991 sampai tahun 1995, dapat diketahui seperti digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 13 : Proyeksi Penerimaan Restribusi Di TPI Rajawali Dari Tahun 1991 - 1995

Tahun	Nilai Penjualan (Rp)	Tarif Restribusi (%)	Jumlah Restribusi (Rp)
1991	1.741.575.595	10 %	174.157.559
1992	1.982.352.777		198.235.177
1993	2.229.469.198		222.946.919
1994	2.482.927.859		248.292.785
1995	2.742.727.759		274.272.775

Sumber : Data Diolah Sendiri

Dengan demikian sumber pendapatan daerah dari restribusi untuk pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Ujung Padang yang berasal dari pelelangan ikan pada umumnya dari T. Rajawali khususnya adalah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial dimana nilai restribusi yang dapat dipungut dari pelelangan ikan ini cukup besar dan senantiasa memperhatikan kecendrungan peningkatan dari tahun ke tahun.





BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

6.1. Kesimpulan .

1. Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang merupakan salah satu daerah yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, oleh karena itu peningkatan dalam penerimaan pendapatan asli dari daerah ini mendapat perhatian serius guna menjamin kelangsungan pembangunan maka sehubungan dengan itu salahsatu sumber pembiayaan pembangunan adalah Pelelangan Ikan Rajawali yang mana secara langsung ditangani oleh pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, untuk itu penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang ditarik antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa volume kegiatan tempat pelelangan ikan di TPI Rajawali dari tahun ketahun selama beberapa terakhir ini yakni dari tahun terakhir ini yakni dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 senantiasa mengalami peningkatan, peningkatan mana bervariasi antara 1,02% sampai dengan 1,47% setiap tahunnya. Penjualan jenis ikan laut dan ikan tambak dalam priode yang sama, sehingga secara keseluruhan maka kegiatan penjualan ikan

- dalam priode tersebut tidak mengalami penurunan.
- b. Dengan adanya peningkatan volume kegiatan penjualan ikan di TPI Rajawali dari tahun ketahun dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kenaikan maka hasil penjualan ikan yang diperoleh para nelayan dan petani tambak selama priode tersebut dari tahun ketahun menunjukkan angka peningkatan, hal ini bukan saja disebabkan karena volume kegiatan penjualan itu sendiri mengalami kenaikan tetapi juga disebabkan karena harga jual per satuan ikan tersebut juga memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ketahun.
- c. Dampak positif yang diperoleh pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang atas peningkatan hasil penjualan ikan di TPI Rajawali ini adalah dengan adanya peningkatan penerimaan restrebusi perolehan ikan, restrebusi mana dipungut berdasarkan hasil penjualan ikan itu sendiri.
- d. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan volume kegiatan penjualan ikan di TPI Rajawali ini antara lain disebabkan karena para nelayan dalam usaha meningkatkan hasil tangkapannya telah menggunakan sarana penangkapan ikan lebih modern dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya, sehingga usaha penangkapan tersebut telah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Demikian pulayhalny

dengan petani tambak yang juga dari tahun ketahun melakukan mekanisasi dalam usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas dari tambak yang dikelolanya.

6.2. Saran-Saran

Dalam rangka usaha-usaha untuk lebih meningkatkan volume kegiatan pelelangan ikan pada umumnya dari kegiatan TPI Rajawali khususnya, peningkatan mana bukasaja dinikmati secara positif oleh para nelayan dan petani tambak, tetapi juga dirasakan oleh pemerintah daerah dengan meningkatnya pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi, maka berikut ini penulis mengajukan beberapa saran-saran antara lain :

- a. Penyuluhan-penyuluhan terhadap para nelayan dan petani tambak tentang penggunaan sarana penangkapan ikan yang lebih efektif dan efisien kiranya ditingkatkan terus menerus, tentunya usaha ini harus dapat dilakukan dengan baik melalui program lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan dinas perikanan beserta instansi-instansi lain yang terkait didalamnya.
- b. Pengawasan yang selama ini sudah membaik kiranya dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam hal usaha pengawasan terhadap para nelayan dan petani tambak agar kegiatan penjualan ikan dapat lebih

6

terkonsentrasi ditempat pelelangan ikan yang telah ditetapkan, sehingga juga didalam pemungutan retribusi juga semakin baik.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Buku-buku :

1. Goedhart. 1973. Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara. Terjemahan Ratmoko, Jakarta : Djamban. Halaman 90,91 dan 92.
2. Makkaliwe, W.H. 1983. Sekitar Hubungan Kebijakan an Fiskal dan Kesempatan Kerja. Identitas, Nomor 165 Tahun Ke IX Senin 31 Januari 1983, Ujung Pandang. Halaman 3 dan 67.
3. Munawir, S. 1982. Pokok-pokok Perpajakan. Edisi Kedua, Yogyakarta : Liberty.
4. Soedargo, R. 1964. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Cetakan Ke III, Bandung : N.V. Ersco. Halaman 62.
5. Soemitro, R. 1979. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944. Cetakan Ke VII, Bandung : N.V. Ersco. Halaman 77.
6. Suhadi. 1980. Penyusunan dan Pemantapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Edisi Kedua, Surabaya : Karya Anda. Halaman 22 dan 23.

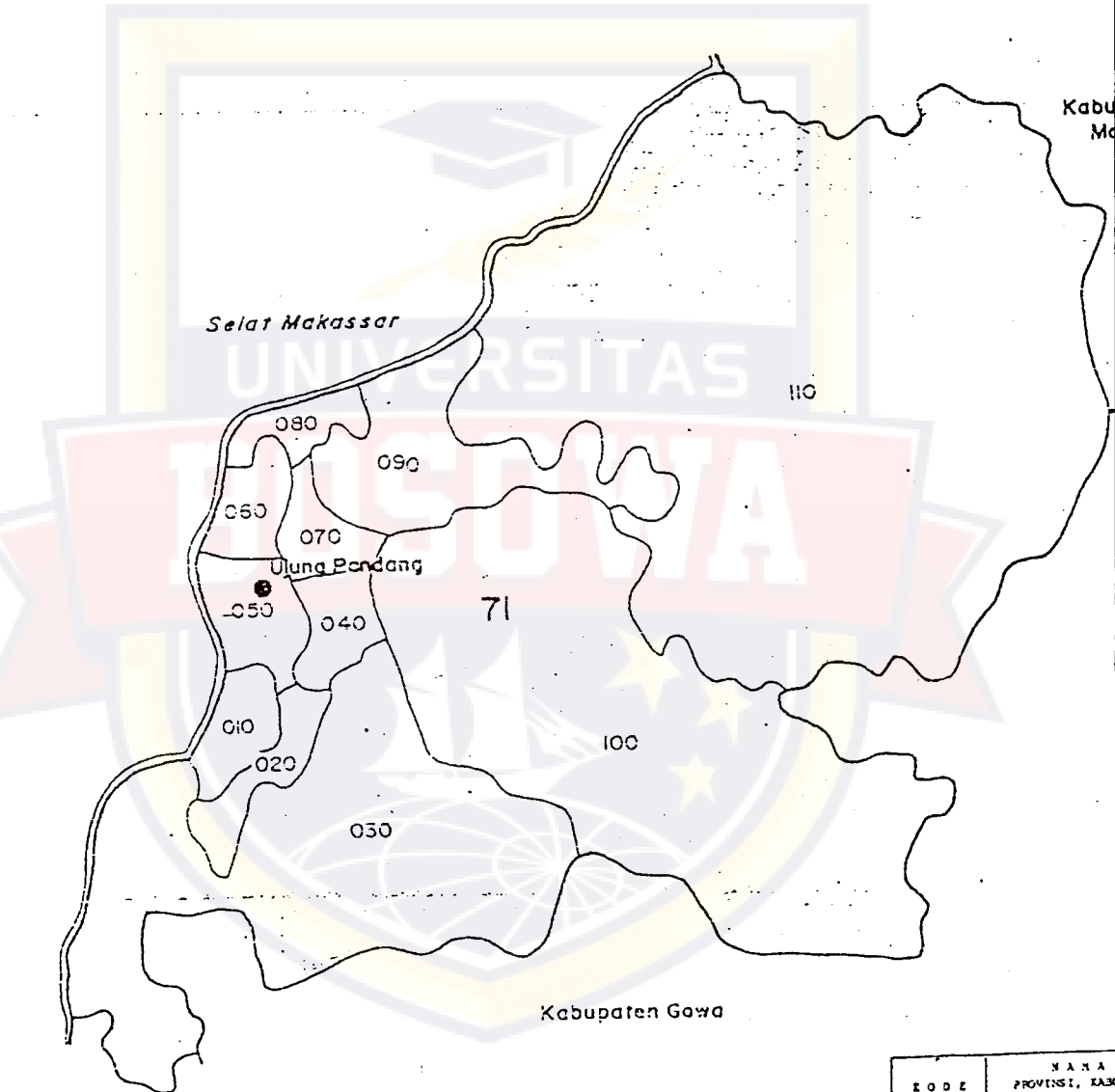
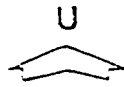
II. Brosur, Majalah.:

1. Biro Pusat Statistik, Ujung Pandang Dalam Angka 199
2. Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang 1979 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1979, Ujung Pandang April.





Lampiran 1 :

PROV. SULAWESI SELATAN (73)
KOTAMADYA UJUNG PANDANG (71)

Skala 1:120 000



Legenda :

-  Batas Kecamatan
-  Batas Pankal
-  Ibukota Kabupaten/Kodya
-  Daerah Kotamadya/
Kota Administratif

K O D E	N A M A PROVINSI, KAB KOTA DAN KEC.
7371	PROV. UJUNG P.
7371310	Kec. M a r i s
320	- Manajene
330	- Tambora
340	- Makassar
350	- Ujung Pa
360	- M a j o
370	- Bonebala
380	- Ujung Pa
390	- T a l i
100	- Panakbu
110	- Biringi